

# LAPORAN KEMAJUAN Oktober-Nopember 2002

## DAFTAR ISI

1. Hearing nasional untuk korban
2. Prosedur Rekonsiliasi Masyarakat
3. Program Pencarian Kebenaran
4. Acolhimento/penerimaan dan dukungan korban
5. Outreach masyarakat, informasi publik dan media
6. Respons masyarakat kepada CAVR
7. Sumber Daya Manusia
8. Pengembangan kapasitas dan pelatihan
9. Badan Penasihat
10. Kunjungan dan pengunjung
11. Rehabilitasi bekas penajara Balide

### Tambahan

Laporan Proses Rekonsiliasi Masyarakat, Oecussi, 22 November 2002.

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR – singkatan Bahasa Portugis) adalah badan nasional yang bersifat independen dan memiliki kuasa hukum. Komisi ini memiliki mandat untuk menjalani pencarian kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi masyarakat, melaporkan pekerjaan dan hasil penelitiannya dan memberi rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut lihat website CAVR [www.easttimor-reconciliation.org](http://www.easttimor-reconciliation.org)

**Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao (CAVR)**

PO Box 144, Dili, East Timor

Mobile: 0407 394 957, Tel +670 (390) 313310 ext 4513

Email: [info@easttimor-reconciliation.org](mailto:info@easttimor-reconciliation.org)

Website: [www.easttimor-reconciliation.org](http://www.easttimor-reconciliation.org)

# UPDATE / Oktober-November 2002

**Penderitaan Timor Timur sangat dalam  
Dari penderitaan ini timbul Kasih Sayang yang besar  
Kasih Sayang yang besar membuat Damai Hati  
Damai Hati membuat Orang yang Damai  
Orang yang Damai membuat Keluarga Damai  
Keluarga Damai membuat Masyarakat Damai  
Masyarakat Damai membuat Negara Damai  
Dan Negara Damai membuat Dunia Damai.  
Semoga semua ciptaan hidup dalam Kebahagiaan dan Perdamaian  
*Adapted from Cambodia***

Update yang terakhir melaporkan tentang aktivitas-aktivitas Komisi pada bulan Agustus-September dan berpusat pada tingkat akhir penetapan operasional Komisi, termasuk pelatihan dan penurunan tim-tim distrik. Bulan Oktober-November adalah masa konsolidasi aktivitas-aktivitas dalam program tim-tim ini di seluruh negeri. Pada masa ini, Komisi telah beroperasi secara penuh dan mengambil langkah-langkah utama dalam penerapan program intinya, terutama dalam bidang-bidang kunci dukungan korban, pencarian kebenaran dan rekonsiliasi masyarakat. Hasilnya, kami kini dapat melaporkan secara terperinci bagaimana program kerja CAVR berjalan di lapangan. Setelah kerja keras dalam pembentukannya, saat ini adalah saat yang menyenangkan untuk Komisi. Untuk memberikan wawasan ke dalam aktivitas-aktivitas ini – yang dilaporkan di sini untuk pertama kalinya – laporan ini termasuk beberapa laporan terperinci.

*Catatan: singkatan CAVR dalam laporan ini adalah singkatan dalam bahasa Portugis untuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur.*

## 1. Hearing Nasional untuk Korban

Hal utama yang terjadi dalam dua bulan terakhir ini adalah Hearing Nasional untuk korban 'Rona Ami Lian' (Tetun - 'Dengarkanlah Suara Kami') yang diatur oleh CAVR, pada tanggal 11 dan 12 November 2002 di Dili. Hearing ini bersamaan dengan peringatan ulang tahun ke 11 pembantaian Santa Cruz, dalam rangka mengangkat pentingnya hari ini bagi hak asasi manusia di Timor Timur.

Pelaksanaan ini merupakan pentas bagi kesaksian empat belas orang Timor Timur yang menceritakan pengalaman mereka sebagai korban kejahatan hak asasi manusia di Timor Timur selama masa konflik politik. Tujuannya adalah untuk mendengarkan cerita mereka dan melalui laporan-laporan individual ini mengambil bagian dalam apa yang dialami secara nasional, agar dapat membantu menyembuhkan para individu yang terlibat dan negara yang mendengarkan. Hearing ini diadakan dalam forum publik, bekas auditorium CBRT yang bersebelahan dengan kantor nasional Komisi, dan disiarkan secara langsung oleh Radio Timor Leste dan Radio Rakambia. Juga peristiwa ini disiarkan secara nasional oleh TV Timor Leste dan internasional oleh CNN, Sydney Morning Herald, The Age, ABC Radio (Australia), AP, dan the Norwegian press.

Banyak yang dilakukan untuk mempersiapkan acara ini, termasuk proses penyeleksian di semua distrik dari orang-orang yang sudah memberikan pernyataan kepada CAVR selama tiga bulan pertama operasinya. Mereka yang dipilih untuk memberi kesaksian adalah mereka yang

menderita kejahatan HAM selama periode mandat CAVR untuk menyelidiki, 1974 –1999, sejumlah kejahatan dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Enam perempuan dan 8 laki-laki ikut serta, dari kisaran umur 20-an hingga 60-an. Loka karya selama dua hari diadakan di Dili sebelum hearing untuk memastikan bahwa mereka yang memberikan kesaksian benar-benar dipersiapkan dan mengerti proses ini.

Hearing dimulai sesudah upacara pembukaan termasuk paduan suara, puisi dan pidato-pidato oleh Jacob Fernandes, Wakil Ketua Parlemen Nasional dan Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR. Presiden Xanana Gusmao sedang berada di luar negeri pada saat itu. Mr Fernandes anggota Parlemen Fretilin dia sangat mendukung Komisi dan mendengarkan mereka yang menderita. Dalam komentarnya, Ketua CAVR mengamati bahwa 'dengan mengakui penderitaan individu-individu, kita mengakui penderitaan semua orang Timor, kami mendengarkan cerita nasional kita.' Dia menambahkan bahwa 'penting bagi kita untuk mendengarkan korban dari semua periode mandat kami, termasuk korban dari semua sisi konflik. CAVR bersifat independen dan memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan sikap tidak memihak dalam semua pekerjaannya'.

Setiap orang berdiri di tengah-tengah panggung di antara Komisaris-Komisaris Nasional dan yang lainnya untuk memberikan kesaksian mereka, dan sesudah upacara singkat pengambilan sumpah, menceritakan pengalamannya secara lisan. Pada akhir setiap kesaksian Komisaris Nasional memberikan pertanyaan untuk mendapat penjelasan jika ada informasi yang hilang atau untuk melakukan refleksi lebih jauh mengenai konsekwensi pengalaman ini terhadap kehidupan orang tersebut. Kebesaran hati dan ketabahan yang ditunjukkan oleh mereka yang ambil bagian dalam menceritakan cerita mereka yang seringkali sangat menyedihkan sangatlah besar dan memiliki pengaruh yang besar atas mereka yang mendengarkan, baik mereka yang hadir di auditorium maupun mereka yang mendengarkan di rumah.

Ditanya oleh Komisaris Nasional apa yang ingin mereka katakan kepada pimpinan Timor Timur, para korban mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah bahwa pengalaman mereka tidak akan pernah diulangi di Timor Timur.

### **Mendengarkan Suara Mereka**

*Anda sekalian telah menceritakan kepada kami penderitaan Anda selama dua hari ini, namun kami ingin mengatakan kepada anda sekalian bahwa anda tidak sendirian. Lewat cerita anda anda telah membagikan duka anda dengan kami, dan sekarang kami semua merasakannya dengan anda. Anda bisa lihat saat ini bagaimana cerita anda mempengaruhi kami semua. Kami membuka hati kami untuk anda.*

Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR

Madalena Pereira menceritakan bahwa dia ditahan di basis militer Indonesia di Ermera selama satu tahun, di mana dia ditahan sebagai 'pengantin perang' oleh seorang tentara di sana dari tahun 1977-78. Dia bercerita bahwa dia melahirkan dua anak, satu meninggal dan satu anak laki-laki yang masih hidup sampai saat ini. Dia juga menceritakan bagaimana dia dan anak laki-laknya terus menderita stigma dalam masyarakatnya hingga saat ini.

Suatu kesaksian yang sangat dramatis diberikan oleh Atanacio da Costa, yang menceritakan perlakuan keji oleh milisi di luar rumahnya di Oecussi pada bulan April 1999. Dipotong beberapa kali dengan parang, dia jatuh ke tanah, di mana dia ditusuk di perut dengan baret senjata. Mr da Costa menunjukkan perbuatan keji ini, untuk menunjukkan bagaimana dia diperlakukan pada saat di mana dia sama sekali tidak berdaya, kemudian dia membuka bajunya untuk menunjukkan bekas luka akibat serangan ini. Dia mengatakan kepada Komisaris upaya medis untuk memperbaiki luka-luka tubuhnya, termasuk sepuluh operasi, dan efek yang menyakitkan yang harus dijalaninya setiap hari dalam hidupnya.

Dalam kesaksian lain, Komisaris mendengarkan cerita-cerita tentang pemenjaraan paksa anggota keluarga pejuang FALINTIL di Atauro, pada akhir tahun 1970-an. Teresinha da Silva dari Aileu berbicara mengenai pemaksaan masyarakat sipil untuk masuk ke kamp oleh FRETILIN pada tahun 1975, sebelum masuknya Indonesia, dan kematian karena kelaparan yang dialami banyak orang akibat tidak adanya makanan dalam kamp-kamp ini.

Pada waktu yang sangat menyedihkan, dan kesaksian akhir dari kedua hari ini, Esmeralda dos Santos memberikan kesaksian di mana dia dibawa dari gereja Suai pada bulan September 1999 ke sebuah sekolah di dekatnya, bersamaan dengan beberapa orang wanita lainnya, mereka ditahan selama seminggu dan kemudian diperkosa berkali-kali di depan yang lain. Dia menceritakan bahwa mereka dibawa ke Timor Barat di mana kejahatan seksual

tersebut terus berlanjut. Dia berkata bahwa dia melahirkan seorang anak dari kejadian ini, dan bertanya kepada hadirin apakah dia boleh memperkenalkan anak perempuannya. Semua berseru bahwa mereka menyambut anaknya yang berumur satu tahun, dan dia dibawa ke atas panggung. Esmerelda memperkenalkan Mary Robinson, dinamakan seperti Komisaris Tinggi untuk HAM yang mengunjunginya di Suai tahun 2000 dan bertemu dengan bayinya yang baru lahir. Esmerelda, seperti wanita-wanita lain sebelumnya, berbicara dengan kekuatan dan kejelasan mengenai pengalaman mereka, dan menunjukkan kebesaran hati mereka. Pada saat mendekati akhir kesaksian Esmerelda, emosi hadirin sangat tinggi. Di dalam auditorium kelompok-kelompok orang menangis dan saling bersandar pada yang lain. Mereka berkata bahwa mendengarkan cerita-cerita ini membawa mereka kembali kepada pengalaman mereka sendiri yang penuh trauma: seorang wanita, dikelilingi oleh sekelompok temannya yang penuh tangis mengingat suaminya yang terbunuh sehari sesudah pernikahan mereka pada bulan Agustus 1999.

Seminggu setelah hadirin ini, tim CAVR berkunjung ke desa di puncak di Oecussi, salah satu tempat yang paling terpencil di Timor Timur, mereka menceritakan bahwa mereka mendengar siaran radio pada saat hearing dan menangis mendengar kesaksian Esmeralda.

*Kesaksian-kesaksian secara penuh akan diberitakan pada website CAVR: [www.easttimor-reconciliation.org](http://www.easttimor-reconciliation.org)*

## 2. Prosedur Rekonsiliasi Masyarakat

Komisi dengan aktif terlibat dalam memfasilitasi rekonsiliasi masyarakat di seluruh wilayah Timor Timur dan dengan sangat cepat bertumbuh dalam keyakinan konsep dan pelaksanaan dari proses yang sensitive ini. Rekonsiliasi hearing yang sukses kini telah diadakan di lima distrik di mana CAVR telah memulai kerja lapangannya. Program ini pada awalnya ditunda karena ketidakpastian akibat diajukannya hukum amnesti pada bulan Mei. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Lu'Olo, Presiden Parlemen Nasional dan mayoritas partai Fretilin, Komisi memutuskan untuk maju dan mengadakan hearing yang pertama di Maumeta, Liquica, pada tanggal 23 Agustus, disaksikan oleh Mary Robinson, yang pada saat itu menjabat Komisaris Tinggi untuk HAM.

Sejak saat itu, 143 pelaku kejahatan telah memberikan pernyataan kepada CAVR. Hingga saat ini, rekonsiliasi hearing telah diadakan dan melibatkan 50 pelaku kejahatan. Proses ini ditujukan untuk membantu integrasi kembali orang-orang yang telah menyakiti masyarakat mereka dengan kejahatan-kejahatan kecil, dan didasarkan pada pelaku kejahatan yang dating secara sukarela untuk berpartisipasi. Kebanyakan dari para pelaku kejahatan ini adalah anggota kelas bawah dari kelompok-kelompok jenis milisi yang beroperasi pada tahun 1999. Karena sebagian besar dari hearing dilakukan pada tingkat pedesaan, mereka pada umumnya adalah proses rekonsiliasi tingkat grassroots yang melibatkan orang-orang yang terpisah karena kejahatan namun sebaliknya tinggal sangat dekat mereka seperti keluarga. Hearing-hearing ini bervariasi dari kejadian yang sederhana yang melibatkan satu orang pelaku hingga kejadian yang sangat besar seperti upacara kebudayaan masyarakat yang melibatkan banyak orang, namun semuanya sejauh ini dikarakteristikan oleh keinginan besar masyarakat untuk memberikan pengampunan. Korban-korban yang menghadiri hearing diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemberi pernyataan dan berbicara mengenai bagaimana kejahatan mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk membawa kepada kemiskinan. Banyak telah menekankan pentingnya melupakan kejahatan yang telah dilakukan dan mulai membangun bangsa yang baru. Pada setiap hearing diadakan upacara adat tradisional *lulik* atau upacara adat, dengan *lia nain* memainkan peranan penting dalam upacara. *Lulik* (Tetun) atau *adat* adalah system hukum tradisional dan kebiasaan yang mengatur kehidupan di desa. Penjaga system ini adalah *lia nain* yang partisipasinya menguatkan kredibilitas hearing pada tingkat masyarakat lokal. Bukti-bukti dari tiga bulan pertama dari operasi ini adalah bahwa pelaku kejahatan, korban dan masyarakat menganggap proses ini sangat relevan dan Komisi berharap bahwa tuntutan untuk proses resmi yang ditawarkan oleh CAVR akan meningkat secara signifikan. Pada bulan Desember hearing akan diadakan di Ermera, Maliana, Manufahi dan distrik lainnya.

Prosedur-prosedur telah dibentuk dengan Kantor Penuntut Umum yang diperlukan untuk memberikan persetujuan diadakannya hearing untuk setiap kasus. Ini telah berjalan dengan sangat efektif.

Berikut ini adalah ringkasan hearing rekonsiliasi baru-baru ini:

**29 Oktober: Fafelebo, dekat Liquica.** Satu pemberi pernyataan dan satu korban. Pemberi pernyataan terlibat dalam intimidasi dan pemukulan. Hearing menghasilkan persetujuan bahwa pemberi pernyataan harus memperbaiki sekolah local, bekerja sama dengan korban setelah korban secara sukarela menawarkan untuk membantu.

**30 Oktober: Lacluta, dekat Viqueque.** Sembilan pemberi pernyataan, sembilan keluarga korban. Pemberi pernyataan terlibat dalam pembakaran rumah-rumah dan perusakan harta milik. Hearing menghasilkan persetujuan bahwa semua pemberi pernyataan akan bekerja sehari seminggu selama 4 minggu untuk membangun gereja.

**13 November: Tutuala, distrik Los Palos.** Satu pemberi pernyataan, dua korban. Pemberi pernyataan terlibat dalam intimidasi dan pemukulan. Tidak ada tindakan rekonsiliasi yang dianggap perlu dilaksanakan.

**18 November: Haleu, Metinaro, dekat Dili.** Hearing dihadiri oleh 500 orang dan dibuka oleh pimpinan desa yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa dengan ambil bagian dalam proses rekonsiliasi mereka membantu membangun bangsa yang baru. Pemberi pernyataan menjelaskan bahwa mereka bergabung dengan kelompok milisi pada tahun 1999, dia dipaksa untuk menjadi anggota oleh tentara Indonesia dan merasa bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Dia menekankan bahwa dia tidak melakukan kejahatan apapun dan minta maaf kepada semua yang hadir atas tindakannya. Setelah berkonsultasi dengan masyarakat yang hadir dan mendiskusikannya di antara mereka, 5-anggota panel (terdiri dari Komisaris Regional Juanico P. dos Santos, pimpinan desa, pimpinan desa tradisional, dan perwakilan gereja dan pemuda) mengumumkan bahwa permintaan maaf merupakan hukuman yang sesuai dan tidak ada hukuman lain yang perlu diberikan.

**19 November: Babuli, Metinaro, dekat Dili:** tiga pemberi pernyataan, lima korban. Hearing diketuai oleh Komisaris Regional Dili Teresina M. Cordoso. Dua pemberi pernyataan yang pertama telah melakukan kejahatan membakar lima rumah dalam masyarakatnya pada tahun 1999; yang ketiga adalah bekas anggota milisi yang telah mengancam anggota masyarakat untuk memilih otonomi dengan Indonesia pada tahun 1999. Ketiganya meminta maaf atas perbuatan mereka, meminta pengampunan dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan mereka dan berkata bahwa mereka melakukan kejahatan di bawah ancaman tentara Indonesia. Setelah mendapatkan pertanyaan masyarakat kepada pemberi pernyataan, panel memutuskan bahwa mereka tidak akan memberikan hukuman kepada pemberi pernyataan pertama. Keputusan bagi dua pemberi pernyataan ditunda karena salah satu korban mereka tidak hadir. Para pemberi pernyataan memeluk korban mereka dan hadirin yang ada kemudian mereka makan buah pinang dan minum tuak bersma sebagai tanda rekonsiliasi.

**22 November: Nitibe, Oecussi.** 31 pemberi pernyataan dan banyak korban. Pemberi pernyataan bertanggung jawab atas perusakan harta milik, perusakan dan pencurian ternak, tindakan fisik dan intimidasi. Beberapa pemberi pernyataan memberikan hadiah secara simbolik berupa tais (kain tenun Timor) dan ornamen tradisional kepada keluarga korban. Yang lainnya mengatur pembayaran kembali berupa ternak.  
(Lihat Appendix untuk laporan secara rinci mengenai rekonsiliasi Nitibe)

### 3. Program pencarian kebenaran

Divisi Pencarian Kebenaran adalah bagian yang terbesar dalam CVAR dengan staf di seluruh negeri sejumlah lebih dari 70 orang. Divisi ini terdiri atas Pengambil Pernyataan (56 pekerja

lapangan), Pembaca Pernyataan (6 orang yang berpusat pada kantor nasional, dibantu oleh satu internasional), Pemroses Tanggal (4 berpusat pada kantor nasional), seorang Peneliti/Tim Investigasi (3 di kantor nasional, dibantu oleh 3 internasional), dan satu pegawai Hearing Publik (saat ini kosong). Divisi ini diketuai oleh Hugo Fernandes.

Pada akhir bulan November, tim distrik CAVR bekerja di semua 13 distrik telah mengambil 2160 pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini berhubungan dengan kejahatan yang terjadi dalam mandat CAVR periode 1974-1999. Tim pengambil pernyataan telah mengembangkan keahlian mereka dengan sangat baik pada pekerjaan ini dan dapat diharapkan meningkatkan jumlah pernyataan dan kualitasnya sejalan dengan perkembangan kerja mereka. Mereka telah didukung dalam pekerjaannya oleh staf kantor nasional yang memantau kualitas pernyataan-pernyataan dan menyediakan pelatihan lanjutan sebagaimana diperlukan. Dengan cara yang dilakukan sekarang, CAVR dapat memenuhi target yang direncanakan yaitu mengambil 8700 pernyataan.

Selama masa di bawah pengamatan kembali, konsultan Ken Ward menyelesaikan dan memasang data base CAVR, membantu pengangkatan empat personel data entry dan menyediakan pelatihan untuk mereka. Setelah penggunaan dan pengkodean pernyataan oleh tim yang terdiri dari enam pembaca pernyataan, data dimasukkan ke dalam data base yang baru. Keempat prosesor sementara ini memasukkan 20 data sehari, dan diharapkan bisa meningkat dengan latihan yang cukup. Tim ini pada saat ini dibantu oleh penasihat internasional, Sophie Kahn, yang juga menyediakan analisa pernyataan. Backup teknis juga disediakan oleh unit IT CAVR.

Bekerja sama dengan Komisaris Nasional dan staf senior Timor Timur, sejarawan dan ahli mengenai Indonesia Dr Gerry van Klinken telah menyelesaikan program penelitian CAVR dan menyelesaikan konsultasi 3 bulannya. Sebagaimana dilaporkan dalam Update sebelumnya, program ini akan menyelidiki sejumlah masalah yang penting secara nasional termasuk pemindahan dan kelaparan, pembunuhan-pembunuhan utama, TNI, dan efek kejahatan bagi kaum perempuan dan anak-anak. Staf Timor Timur juga telah mengangkat ke dalam posisi peneliti, dan dengan bantuan dana pembangunan kapasitas GTZ (Jerman), dua staf internasional telah bergabung dengan CAVR untuk masa yang singkat untuk membantu tim ini. Tim ini telah mulai penelitian lapangan dalam dua bidang – pembunuhan masal dan pemindahan/kelaparan. Penasihat Khusus CAVR Pat Walsh akan mengkoordinasi tim ini dengan kerjasama dengan Hugo Fernandes, Ketua dari Divisi Pencarian Kebenaran, dan Dr van Klinken yang akan kembali ke Timor Timur di tahun baru. Penelitian juga akan dilakukan dalam persiapan untuk hearing publik untuk tahanan politik yang dijadwalkan untuk pertengahan Februari.

#### **4. Acolhimento/penerimaan dan dukungan korban**

Diperkirakan ada lebih dari 32,000 orang Timor Timur yang masih tinggal sebagai pengungsi di Timor Barat dan CAVR sangat prihatin dan ingin membantu integrasi mereka kembali ke Timor Timur apabila mereka memilih untuk kembali. Hingga saat ini, CAVR telah menjalankan kegiatan-kegiatan berikut selama dua bulan terakhir:

- Komisaris Isabel Guterres terus memantau dengan aktif situasi di Timor Barat dan telah bergabung dengan UNHCR dalam membantu kunjungan-kunjungan 'pergi dan lihat' ke wilayah Viqueque di Timor Timur.
- CAVR menerima undangan dari Presiden Xanana Gusmao untuk mendampingi dalam kunjungannya ke Timor Barat tanggal, 30 Oktober – 4 November. Delegasi CAVR terdiri dari Ketua CAVR, Aniceto Guterres Lopes, Komisaris Nasional Olandina Caeiro dan Pendeta Agostinho de Vasconcelos, dan tiga staf – Hugo Fernandes (Divisi Pencarian Kebenaran), Lamartinho Oliveira (Hubungan Media) dan Antonia Carmen (Pegawai Program Radio). Jadwal kunjungan termasuk ke Kupang, Kefa, Atambua dan Mota Ain dan

memberikan kesempatan yang sangat baik bagi VAVR untuk menjelaskan pekerjaan Komisi dan menjelaskan salah pengertian mengenai kehidupan di Timor Timur. Presiden Gusmao sangat teras teras dalam dukungannya terhadap Komisi dan terhadap hokum/peradilan di Timor Timur. Kunjungan ini diikuti oleh pertemuan dengan pimpinan pro otonomi yang diadakan di Bali tanggal 13 November, di mana Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR, hadir atas undangan Presiden.

- CAVR meneruskan dialog dengan UNHCR mengenai peranan timbal balik mereka dalam konteks downsizing UNHCR. Ini termasuk kunjungan bersama ke pos perbatasan UNHCR di Batugade pada tanggal 26 November.

Sebagai hasil dari kegiatan di atas, CAVR telah memutuskan dua inisiatif penting sehubungan dengan Timor Barat:

- Untuk mencari secara aktif dan nyata kemungkinan-kemungkinan pengambilan pernyataan di Timor Barat, agar supaya – sejalan dengan kebebasan dan ketidakberpihakan CAVR – Orang Timor Timur di sana mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pernyataan kebenaran. Ini akan membutuhkan kerja sama dari baik pemerintah Indonesia dan Timor Timur, program informasi masyarakat yang intensif dan pertimbangan keamanan serta implikasi keuangan.
- Untuk membahas dengan UNHCR penempatan pegawai CAVR pada pusat penerimaan UNHCR di Batugade. Peran pegawai tersebut adalah untuk bertemu dengan pengungsi pada saat mereka kembali, menjelaskan kepada mereka bagaimana CAVR dapat membantu mereka untuk integrasi kembali secara sosial, untuk menginformasikan kantor-kantor regional yang bersangkutan mengenai orang-orang Timor Timur yang kembali ke daerah mereka dan untuk bekerja sama dengan pegawai-pegawai HAM UNMISSET distrik dan nasional untuk memastikan perlindungan hak mereka yang kembali.

Tim Dukungan Korban di Kantor Nasional dan di Kantor Distrik menjadi sangat sibuk dalam dua bulan terakhir ini.

Pada Kantor Nasional, suatu tim berpusat pada persiapan untuk hearing nasional bagi korban yang pertama tanggal 11-12 November. Ini termasuk hubungan lebih jauh pada semua distrik, mengadakan loka karya untuk semua yang terlibat sebelum hearing, dukungan selama hearing dan dukungan lanjutan.

Sebagai tambahan, tim Nasional telah mulai penerapan pelatihan lapangan untuk Komisaris Regional dan staf Dukungan Korban di tingkat Distrik sehubungan dengan pemetaan pengaruh kejahatan bagi masyarakat. Pelatihan-pelatihan ini diadakan di dalam masyarakat, melalui proses learning by doing (belajar dari praktek). Pada akhir bulan November, pelatihan-pelatihan telah diadakan di Liquica, Baucau, Lautem, Viqueque dan Manufahe. Distrik-distrik yang lainnya akan melengkapi pelatihannya selama bulan Desember. Tim-tim distrik juga sibuk memberikan dukungan bagi masyarakat dalam proses rekonsiliasi, yang memiliki penekan yang kuat dalam mendukung korban dan membantu memberikan kembali harga diri mereka.

## **5. Outreach masyarakat, informasi publik dan media**

Sejalan dengan CAVR beroperasi penuh di semua distrik, informasi masyarakat dan media menjadi lebih penting.

Radio ternyata menjadi sarana yang sangat optimal dalam komunikasi di Timor Timur. Dengan dukungan dana USAID, sebuah tim Informasi Masyarakat telah dibentuk dengan focus pada radio. Tim ini telah mengumpulkan materi dari semua distrik dan merekam kejadian-kejadian nasional. Program radio mingguan akan dimulai pada tanggal 4 Desember. Program ini akan disiarkan di seluruh distrik. Tujuan utamanya adalah untuk merekam kejadian-kejadian di distrik

di seluruh negeri agar suatu proses penyembuhan nasional dan rekonsiliasi dapat diproyeksikan.

Sebuah video kaset disk bersifat pendidikan selama 25 menit telah diselesaikan pada bulan November, dengan bantuan dana dari Inggris. Video ini ditayangkan pada TVTL pada tanggal 10 November, malam hearing publik pertama, dan diterima dengan baik. Kaset ini akan dibagikan kepada semua tim distrik untuk digunakan dalam sosialisasi kegiatan-kegiatan di setiap sub-distrik, dan LSM yang terkait dan organisasi-organisasi masyarakat. Awalnya dalam bahasa Tetum, video ini sekarang diproduksi dalam bahasa Inggris untuk donor dan agen-agen internasional.

Dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di semua wilayah di Timor Timur, media local meningkatkan liputannya mengenai Komisi. TVTL mengambil film peristiwa rekonsiliasi masyarakat yang besar di Lacluta, Viqueque, pada tanggal 30 October. Radio telah meliput sejumlah peristiwa rekonsiliasi. Media Timor memainkan peranan kunci dalam memproyeksikan hearing nasional pertama kepada pemirsa nasional. Radio Timor Leste dan Radio Rakambia menyiarkan secara langsung dari lokasi hearing. Laporan besarnya emosi dari kesaksian-kesaksian anggota masyarakat di desa gunung Lele-Ufe di Oecussi menyaksikan besarnya pengaruh media ini. Radio Timor Leste telah mengadakan empat panel diskusi dengan pimpinan kunci di masyarakat Timor mengenai kerja Komisi dalam dua bulan terakhir. Harian nasional, Suara Timor Lorosae, dan beberapa majalah juga telah meliput kegiatan-kegiatan CAVR dan masalah-masalah yang berkaitan dengan Komisi.

Media internasional memiliki minat terhadap hearing pada tanggal 11-12 November. Hearing ini menarik berita dari CNN, Sydney Morning Herald, The Age (Melbourne), ABC Radio (Australia), AP, dan sebuah surat kabar Norwegia newspaper. Sebagai tambahan, media internasional juga telah menceritakan mengenai hearing rekonsiliasi masyarakat.

Pada tahun baru, video kaset disk yang kedua akan diproduksi dan akan menunjukkan peristiwa-peristiwa rekonsiliasi masyarakat di seluruh negeri. Materi cetak juga direncanakan untuk awal tahun baru, terutama untuk membantu masyarakat local untuk mengerti penuh kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi yang diadakan oleh Komisi dan untuk mengembangkan semangat untuk penyembuhan, rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Sejumlah peristiwa-peristiwa masyarakat seperti konser, kesenian, puisi dan kompetisi musik akan juga menambah semangat ini.

CAVR tengah menyelidiki rencana dengan UNHCR untuk menerima mereka yang kembali dari Timor Barat pada pos penerimaan UNHCR di Batugade yang akan termasuk memberikan penjelasan kepada mereka yang kembali mengenai CAVR dan perannya dalam integrasi sosial kembali ke dalam masyarakat. Ini akan termasuk membagikan literature yang disediakan khusus bagi orang-orang Timor Timur ini.

Setelah pertemuan-pertemuan pada bulan September dengan LSM-LSM dan media, Divisi Outreach masyarakat telah melanjutkan programnya untuk bertemu dengan stakeholder-stakeholder utama. Pada tanggal 21 Oktober, suatu pertemuan diadakan dengan partai-partai politik. Perwakilan dari 10 partai politik hadir. Pertemuan terpisah direncanakan dengan partai mayoritas Fretilin.

## **6. Respons Masyarakat terhadap CAVR**

Selama periode bulan Oktober-November, sebagai respons terhadap kegiatan dan visibilitas CAVR yang meningkat, media Timor telah melaporkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh CAVR maupun kerja CAVR secara umum.

Respons masyarakat terhadap CAVR pada tingkat distrik sangatlah positif dan terbuka dan masyarakat menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi dalam berbagai elemen kerja CAVR. CAVR sekarang harus mempertimbangkan bagaimana CAVR bisa dengan efektif memenuhi tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam konteks ini, telah ada beberapa kritik terhadap CAVR di distrik-distrik tertentu. Kelihatannya berpusat secara local, dan berhubungan dengan masalah-masalah local seperti Komisaris Regional tertentu atau anggota staf dan latar belakang mereka. Contohnya, di Oecussi, sebuah surat dikirimkan dengan keluhan mengenai pengangkatan seorang Komisaris Regional. Pada bulan November Komisaris Nasional Jacinto Alves dan Pendeta Agostinho de Vasconcelos mengunjungi Oecussi. Mereka bertemu dengan administrasi local dan pemimpin tradisional, dan pegawai HAM UNMISSET distrik, mengenai sejumlah masalah yang berkaitan dengan CAVR termasuk masalah ini. Komisaris Nasional akan kembali ke Oecussi pada bulan Desember untuk konsultasi lebih lanjut termasuk dengan yang mengajukan surat keluhan.

Media Timor juga telah melaporkan adanya ketidaksenangan dengan latar belakang staf CAVR di distrik Ainaro. Staf Kantor Nasional CAVR dan Komisaris Nasional telah datang ke Ainaro dan bertemu dengan anggota masyarakat. Meskipun masalah ini kelihatannya tidak serius, perlu adanya informasi masyarakat yang terus menerus dan pendidikan bagi masyarakat mengenai CAVR, karakternya yang independen dan mandatnya. Misalnya, banyak anggota masyarakat yang menjadi marah karena menurut mereka hanya anggota Fretilin yang boleh menjadi staf CAVR; yang lainnya mengatakan bahwa mereka yang tidak mendukung kemerdekaan secara aktif tidak boleh menjadi anggota CAVR. Komisaris Nasional dan staf senior telah berpartisipasi dalam dua panel diskusi dalam siaran nasional mengenai masalah ini untuk memberikan penjelasan.

Perlu dicatat juga bahwa Komisaris Regional di Manufahe distrik telah mengundurkan diri karena alasan pribadi, dan Komisaris Nasional sedang dalam proses memulai konsultasi masyarakat untuk memilih Komisaris baru.

## **7. Sumber Daya Manusia**

Sepuluh staf orang Timor telah bergabung dengan Kantor Nasional selama bulan Oktober-November. Mereka adalah dua pegawai keuangan, dan sebuah tim peneliti dan data prosesor. Tim ini bertanggung jawab untuk memasukan data dari 2160 pernyataan yang sejauh ini telah dikumpulkan oleh CAVR. Mereka telah dilatih oleh ahli data base internasional, Ken Ward, yang merancang data base CAVR.

Sejumlah anggota tim internasional jangka pendek juga telah bergabung dengan CAVR pada bulan Oktober- November, dengan focus pembangunan kapasitas selama masa konsolidasi ini. Hal ini termasuk dukungan untuk analisa pernyataan dan pemrosesan data, penelitian, rekonsiliasi masyarakat, hearing publik, dukungan korban, radio teknis dan penerbitan video. Dua anggota staf yang baru telah bergabung dengan CAVR: Amy Rothschild selama setahun (didanai oleh Universitas Yale/Notre Dame) dan Chris Vertucci untuk dua tahun (didanai oleh Mennonite Central Committee).

CAVR dengan ini mengkonfirmasi bahwa kesepuluh posisi yang dialokasikan pada 'daftar 200' UNDP telah menerima dukungan donor. Sementara dana dijanjikan, sebagian besar posisi belum dipenuhi. Melalui pendanaan Inggris/EC, posisi Program Manajer telah diisi pada bulan November dan Ms. Galuh Wandita telah mulai bekerja. Posisi Penasihat Hukum (dimungkinkan lewat dana Inggris/EC) juga telah diisi, dan pelamar yang berhasil diharapkan untuk mulai pada bulan Januari 2003. Pendanaan untuk posisi lainnya telah dijanjikan, namun posisi-posisi belum direkrut. AusAID telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan

memberikan Penasihat Keuangan kepada CAVR untuk enam bulan. Posisi Penasihat lainnya akan diberikan oleh EC, Denmark dan Jepang.

## **8. Pembangunan kapasitas dan pelatihan**

Pada bulan Oktober, agen pembangunan Jerman GTZ memberikan dana bantuan khusus kepada CAVR sebesar USD17,500 untuk pembangunan kapasitas untuk kegiatan-kegiatan hingga akhir bulan Desember. Ini telah memungkinkan input pembangunan kapasitas yang memakan waktu termasuk di bawah ini:

- Pengembangan suatu program kesadaran yang efektif dan mendukung korban kejahatan HAM yang menderita trauma dan perawatan sendiri untuk Komisariss CAVR dan staf (Input: dari psikolog dengan pengalaman yang luas mengenai Timor Timur)
- Pelatihan para pelatih untuk tim Dukungan Korban kantor nasional, dan pelatihan dalam lapangan untuk pegawai Dukungan Korban distrik dan Komisariss Regional untuk pemetaan latihan masyarakat untuk mengukur pengaruh kejahatan bagi masyarakat; mengenal sikap-sikap yang berhubungan dengan trauma pada korban kejahatan HAM dan membangun jaringan dan proses referal yang efektif; dan perawatan sendiri untuk Pegawai Dukungan Korban dan Pengambil Pernyataan dari Pencarian Kebenaran. Fokus pada pelatihan distrik dengan menjalankan program-program masyarakat. (Input: bantuan teknis selama dua bulan oleh psikolog dengan pengalaman yang luas mengenai Timor Timur).
- Video pendukung pelatihan untuk tim-tim distrik mengenai pengenalan trauma dan strategi untuk menghadapinya, dan perawatan sendiri dalam hal trauma yang dialami secara tidak langsung. Video ini sementara dalam produksi dan akan diberikan ke semua anggota tim distrik. (Input: produser video)
- Pembangunan kapasitas dari tim analisa pernyataan Pencarian Kebenaran, dan melalui kualitas ini perbaikan kerja tim pengambil pernyataan distrik. Juga pembangunan kapasitas tim data entry, dan memastikan mekanisme kordinasi yang efektif antara tim data entry, tim analisa pernyataan dan pengambil pernyataan distrik. (Input: satu internasional untuk enam minggu).
- Pelatihan produksi informasi: ini termasuk pelatihan radio Cooledit untuk tim Produksi Informasi CAVR (dikerjakan sementara penjadwalan produksi untuk program radio mingguan); pelatihan pengambilan video dan editing untuk tim Produksi Informasi CAVR. (Input: satu pelatih internasional untuk satu bulan).

Sebagai tambahan, Tim Pembangunan Institusional dan Pelatihan, bekerja sama dengan Ti Kordinasi Regional, telah membentuk dukungan yang tetap tentu dan proses pemantauan untuk tim distrik, dalam rangka membangun proses yang responsif untuk memenuhi kebutuhan yang terus menerus.

## **9. Badan Penasihat**

Komisaris Nasional sementara membentuk Badan Penasihat yang terdiri dari individu-individu yang prominen, baik orang Timor Timur maupun dari internasional. Badan ini akan menaikkan status dan kredibilitas Komisi dan membantu Komisi dengan memberikan nasihat dan tanggapan. Komposisi Badan ini, terdiri atas 10 individu, akan diumumkan pada Tahun Baru sesudah yang diundang mengkonfirmasi bahwa mereka menerima tawaran tersebut.

## **10. Keuangan dan pendapatan**

Komisi telah menjalankan pengeluaran yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir untuk membentuk, melengkapi dan pelaksanaan staf dan programnya yang sangat besar. Berikut ini adalah pembangunan utama selama periode bulan Oktober-November:

- Ketua CAVR, Aniceto Guterres Lopes, dan agen Pemerintah Jerman B dengan pengalaman yang luas mengenai Timor Timur GTZ menandatangani kontrak dana bantuan sebesar Euro200,000 pada tanggal 21 November.
- Jerman juga menyediakan dana sebesar USD17,500 untuk membantu dengan pembangunan kapasitas dalam program Informasi Publik/Outreach Masyarakat.
- Kedutaan Besar Inggris sementara dalam proses mentransfer dana sebesar USD61,000 ke dalam rekening CAVR, sisa dana bantuan sebelumnya.
- USAID telah memberikan USD7,985.00 untuk memungkinkan produksi radio mingguan in the house untuk disiarkan pada radio nasional dan radio masyarakat di seluruh Timor Timur.
- UNHCR menyediakan CAVR dengan beberapa perlengkapan, termasuk beberapa kendaraan sebagai bagian dari penurunan programnya di Timor Timur.
- AusAID telah menyetujui secara formal untuk memberikan Penasihat Keuangan kepada CAVR untuk jangka waktu enam bulan. Pengangkatannya diatur oleh ITC's Fasilitas Pembangunan Kapasitas Australia-Timor Timur (CBF) dalam kolaborasi dengan UNDP dan akan dilakukan pada Tahun Baru.
- CAVR telah menulis kepada Perdana Menteri Alkatiri meminta bahwa Inspektur Jenderal akan mengadakan pemeriksaan pembukuan CAVR dalam bulan Desember.

## **11. Kunjungan-kunjungan dan pengunjung**

- 4 Oktober: briefing donor dan presentasi Update Agustus-September.
- 14 Oktober: presentasi program pelatihan HAM oleh Pelayanan Internasional HAM, LSM yang berbasis di Jenewa.
- 15 Oktober: briefing kepada misi penilaian penjara.
- 17 Oktober: briefing partai-partaipolitik Timor Timur
- 29 Oktober: briefing perwakilan Misereor, Dr Martin Brockelmann-Simon, Managing Director, dan Dr Duetting (Asia Director)
- Oktober: Komisaris Isabel Guterres bersama UNHCR dalam beberapa kunjungan 'go and see' ke wilayah Viqueque;
- 30 Oktober-4 November: enam Komisaris Nasional dan staf mengunjungi pengungsi Timor Timur di Timor Barat dengan Presiden Xanana Gusmao.
- 8 November: pertemuan dengan perwakilan dari Pemerintah Jepang, Hashi Hiroharu, Akiko Hayashida (Menteri Luar Negeri, Tokyo) dan Shinichi Kusano (Sekretaris Pertama, Duta Besar Jepang, Indonesia)
- 13 November: Kunjungan Ketua CAVR ke Bali dengan Presiden Xanana Gusmao.
- 18 November: briefing untuk misi peradilan internasional
- 25 November: Pertemuan Ketua CAVR dengan PM Alkatiri.
- 26 November: kunjungan dengan UNHCR ke pusat penerimaan di Batugade.
- 26 November: briefing misi penilaian polisi internasional.
- 28 November: pertemuan dengan John Pitt, Managing Director, Pitt and Sherry.
- 29 November: Ketua CAVR, Aniceto Guterres Lopes, dan Penasihat Kieran Dwyer, berangkat untuk pertemuan internasional komisi kebenaran di New York.

## **12. Rehabilitasi bekas penjara Balide**

Pekerjaan telah dimulai pada rehabilitasi bekas penjara kolonial di Balide, Dili, yang akan menjadi kantor nasional CAVR. Ini adalah proyek peninggalan HAM yang akan ditransfer kepada manajemen masyarakat sesudah CAVR menyelesaikan mandatnya pada tahun 2004. Atap yang baru, lantai semen di beberapa bagian, dan pemberian sistem listrik yang baru dan perpipaan yang baru hampir selesai. Lapisan-lapisan cat (dilakukan dalam waktu beberapa tahun sebelum kunjungan berbagai delegasi internasional) telah dibersihkan dari dinding di

bagian dalam untuk menunjukkan tulisan-tulisan yang dibuat oleh tahanan kira-kira 25 tahun yang lalu, beberapa yang akan disimpan. Pembangunan rumah pertemuan yang besar sedang dalam pembangunan di taman utama ( bekas lapangan latihan). Proyek ini terlambat. Direncanakan untuk mengadakan hearing publik yang bertema ( mengenai tahanan politik) pada tempat baru sekitar pertengahan bulan Februari.

Untuk membantu memikirkan penggunaan jangka panjang kompleks ini, CAVR telah menghubungi beberapa proyek peninggalan HAM di negara-negara lain. Termasuk Irlandia (the Strokestown Park Famine Museum di County Roscommon), Jepang (Hiroshima Peace Memorial Museum) dan Australia (Port Arthur Penjara Convict, Tasmania).

Rehabilitasi ini didanai oleh Jepang. Delegasi CAVR akan mengunjungi Jepang bulan Februari sebagai tamu Pemerintah Jepang.

---

## TAMBAHAN

### ***Laporan Proses Rekonsiliasi Masyarakat Suco Lela-Ufe, Nitibe, Oecussi pada tanggal 22 November 2002***

Oleh Kieran Dwyer, Penasihat CAVR

*Proses ini sangat penting bagi kami. Sangat penting bagi saya sebagai seorang korban, karena ini menunjukkan bahwa saya dapat berdiri di depan masyarakat saya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagi saya, hal ini lebih penting karena bisa membantu kita maju ke depan, sebagai masyarakat dan sebagai bangsa. Kami menjalani penderitaan dan ketakutan selama waktu yang sangat lama. Dan begitu lamanya terpisah. Namun kini kami dapat mulai berjalan ke depan bersama-sama dan membangun bangsa yang baru untuk kami semua dan untuk anak-anak kami.*  
Korban kejahatan HAM pada hearing masyarakat Lele-Ufe

*Di Oecussi kami dibatasi dalam usaha-usaha kami untuk membangun ekonomi karena perpecahan dalam masyarakat kami sejak tahun 1999. Apabila kami tidak dapat bekerja bersama-sama sebagai orang Timor Timur, kami tidak bisa membangun bangsa yang baru dan terutama distrik kami Oecussi. Hari ini dengan bantuan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi, kami dapat memperbaiki perpecahan dalam masyarakat kami, dan ini membantu kamu untuk bersama-sama menyongsong pembangunan seluruh masyarakat bersama-sama.*

Francisco Xavier Marques, Administrator Distrik, Oecussi

*Proses hari ini bukanlah akhir proses rekonsiliasi dalam masyarakat kalian. Ini adalah awal proses sosial yang baru. Ini adalah proses yang harus kita lihat dalam sejarah kita. Rekonsiliasi bukan berarti kita melupakan masa lalu, namun ini berarti kita melihatnya agar dapat mengerti diri kita dengan lebih baik agar dapat melangkah maju sebagai masyarakat. Ini adalah suatu proses di mana kita bisa membangun kesadaran sosial yang baru. Melalui proses ini kita bisa menciptakan suatu budaya yang damai dalam Timor Timur kita yang baru.*

Jacinto Alves, Komisaris Nasional CAVR

Ini adalah Proses Rekonsiliasi Masyarakat (CRP) yang pertama di distrik Oecussi, dan diadakan sesudah tim distrik bekerja di Nitibe (sub distrik Oecussi) selama hampir tiga bulan\*. Laporan singkat ini ditujukan untuk membagi beberapa pengamatan saya dalam proses ini, terutama karena saya sangat terkesan atas kepemimpinan dan kepemilikan masyarakat dalam proses ini dan rasa kepuasan yang dalam yang ditunjukkan begitu banyak anggota masyarakat.

Hearing diadakan di desa Lela-Ufe, desa di atas gunung (*suco*) kira-kira satu setengah jam dengan mobil dalam musim kering dari kota Oecussi (31 km). Desa ini terletak di atas tembok, dengan pemandangan pegunungan Timor Barat di Indonesia, dan lembah-lembah distrik Oecussi di sebelahnya. *Suco* terdiri dari empat *aldeais* atau sub desa, di mana beberapa terletak agak jauh.

Mengunjungi Lela-Ufe sehari sebelum hearing, saya bertemu dengan sejumlah tua-tua desa yang akan menjadi panel untuk hearing, yang sedang bertemu dengan Mr Arnold Sunny, Komisaris Regional untuk tim Oecussi, ketua panel. Dia sedang bertemu dengan tua-tua untuk memberikan penjelasan, dan juga untuk berdiskusi dengan mereka mengenai pendapat mereka mengenai bagaimana acara hari itu akan dimulai. Bersama dengan mereka ada beberapa *lia-nain* atau tokoh adat desa, penjaga kebiasaan dan hukum tradisional. Nitibe terkenal sebagai tempat dengan adat istiadat tradisional yang sangat kuat, dan saya melihat alat pemegang tembakau yang terbuat dari perak (atau seperti logam) dan juga keranjang anyaman yang dipakai oleh kaum laki-laki. Kami duduk di luar melihat pemandangan di Timor

Barat, di samping rumah suci tradisional yang bulat, dengan atap seperti sorong (*uma lulik*), dan di bawah sebuah monumen suci (*lulik*) yang terbuat dari kayu.

Saya diberitahu bahwa pada tahun 1999 desa ini dibagi secara fisik berdasarkan garis-garis politik. Keluarga-keluarga pro kemerdekaan tinggal di satu sisi dan kelompok milisi tinggal di sisi yang lainnya. Pembagian ini menjadi lambang yang sangat kuat atas perpecahan yang terjadi dalam masyarakat. Para tetua mengatakan bahwa satu tujuan dari upacara rekonsiliasi adalah untuk mengikutsertakan semua masyarakat dalam memperbaiki perpecahan ini. Dalam rangka menggambarkan hal ini, mereka membuat beberapa pengaturan mengenai bagaimana orang-orang akan duduk dan bahwa proses ini akan memulai hearing. Mereka menjelaskan bahwa hearing akan memberikan penekanan pada harga diri korban, meskipun tidak menyepelkan pelaku kejahatan (atau 'pemberi pernyataan' sebagaimana mereka disebut dalam proses ini). Bahkan pelaku kejahatan diberikan kain khusus (dikeluarkan oleh UNHCR), untuk menunjukkan bahwa hearing ini memiliki tujuan khusus untuk mengembalikan mereka ke dalam masyarakat.

### **31 pemberi pernyataan**

Hearing mengikutsertakan 31 anggota yang tadinya adalah milisi *Sakunar* (Scorpien) pada tahun 1999, dan dipusatkan pada kegiatan mereka selama bulan April 1999. Ini termasuk membakar rumah-rumah dan merusak harta milik anggota lokal CANRT, maupun serangan fisik, intimidasi dan pencurian ternak anggota masyarakat lainnya. Ke-31 adalah anggota kelompok tingkat rendah, bukan pimpinan. Mereka kembali ke Oecussi pada bulan April 2002.

Setiap anggota telah memberi pernyataan secara tertulis, dibantu oleh staf distrik CAVR, menjelaskan secara rinci apa yang telah mereka lakukan, siapa yang menjadi korban dan mengapa. Pernyataan-pernyataan ini telah dikirim ke Kantor Penuntut Umum, yang telah menyetujui kasus-kasus ini untuk CRP. Persetujuan 11 kasus yang terakhir diterima hanya beberapa hari sebelum hearing, dan panel kurang yakin bahwa hal ini dapat diteruskan – staf mencari korban dan keluarga mereka sore itu, untuk menanyakan apabila mereka mau ambil bagian dalam hearing (mereka telah dihubungi sebelumnya namun tidak tahu bahwa kasus-kasus ini telah kembali dari Kantor Penuntut Umum).

Hearing dijadwalkan untuk dimulai pada jam 10 besok paginya.

Tiba untuk hearing pada jam 9, kami disambut suasana perayaan. Hearing akan dilakukan di belakang gereja desa. Ratusan orang telah berkumpul. Ada band, gitar listrik, keyboard dan biola (diberi listrik dari generator CAVR) – memberikan hiburan bagi para hadirin di satu sisi, sementara sekelompok perempuan yang lebih tua menyiapkan gong logam mereka di bawah pohon. Di samping wanita-wanita tua itu, sejumlah wanita memakai pakaian tradisional yang sangat indah berwarna putih perak dan hiasan kepala yang bertingkat-tingkat, giring-giring di pergelangan kakinya. Suatu saat pusat perhatian tampaknya pada band, kemudian wanita-wanita tua dan mereka yang siap untuk menari. Mereka kemudian mulai pada saat yang bersamaan.

Sejumlah besar orang yang memakai pakaian adat terbaik mereka, kebanyakan dengan warna manik-manik berwarna jingga – mereka ini adalah pemberi pernyataan, korban atau staf CAVR. Dengan 31 pemberi pernyataan, ini mengakibatkan begitu banyak orang yang memakai pakaian tradisional dan merasa seperti ada acara khusus.

Daerah di belakang gereja desa berdebu, didirikan dengan batu-batu kering yang menjadi tembok sehingga membentuk empat panggung yang menuju ke puncak untuk *lulik* atau panggung adat. Sepotong ranting kayu ditanam di tandah di tengah-tengah. Di dasarnya terdapat banyak tempat-tempat yang terbuat dari kayu, dan juga dua kepala kerbau. Juga dua kandung kemih kerbau. Pada puncak ini, seorang tua yang kurus duduk bersamaan dengan seorang wanita tua yang memakai sarung dan baju hitam dengan manik-manik jingga yang banyak dipakai oleh orang-orang lain hari itu. Jelaslah keduanya merupakan penguasa hukum

tradisional. Daerah ini dilindungi oleh pohon yang besar. Di belakang gereja, di bawah *lulik* di tengah-tengah, diadakan hearing di tengah-tengah desa.

Sejalan dengan waktu, saya melihat beberapa orang dengan kostum putih perak memindahkan orang-orang, dan terutama satu tetua bergerak-gerak dengan suatu tenaga. Mereka adalah anggota panel, dan mereka mengumpulkan para pemberi pernyataan dan korban untuk mengambil tempat mereka pada sisi masing-masing di sebelah panel, di bawah *lulik*. Pemanggilan nama dengan menggunakan PA membawa orang-orang ke tempat mereka, dan kami siap untuk mulai. Staf Komisi mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir, kemudian mengundang panel untuk masuk: iring-iringan panel masuk dengan penari yang memakai pakaian tradisionalnya memasuki upacara yang megah.

Di atas tikar besar *biti bo'ot* (big mat), anggota panel menjelaskan kepada masyarakat bagaimana proses ini dimulai. *Biti bo'ot* berada di bawah *lulik*, dengan pemberi pernyataan duduk di sebelah kanannya dan koran di sebelah kiri. Anggota masyarakat duduk di depan, tersebar di kiri dan kanan. Pembesar lokal, termasuk Administrator Distrik, Kepala Polisi Distrik, Kepala Desa dari sub distrik dan pimpinan lokal partai-partai politik duduk di bawah terpal di depan. Pegawai HAM UNMISEt Oecussi memperkirakan ada 1000 anggota masyarakat yang hadir.

### **Pembukaan**

Proses ini dibuka dengan upacara dengan tokoh-tokoh adat menyebarkan *tais* yang berwarna-warni di atas *biti bo'ot*, di depan Panel dan di antara pemberi pernyataan dan korban. Saya diberitahu bahwa ini adalah simbol jembatan antara pelaku kejahatan dan korban. Komisaris Regional Jose Antonio Ote membuka hearing dengan doa. Dia tidak memainkan peran apa-apa dengan panel karena dia adalah korban pada hearing ini, rumahnya dibakar pada saat kejahatan bulan April 1999. Seluruh proses ini dilakukan dalam bahasa lokal *Baikeno*, karena sebagian besar tidak dapat berbicara Tetum maupun Bahasa Indonesia.

Upacara mulai dengan ketua Panel, Mr Arnold Sunny, membacakan ringkasan pernyataan pemberi pernyataan dan memastikan bahwa Penuntut Umum telah menyetujui kasus ini untuk CRP. Dia menjelaskan dasar hukum untuk hearing CRP berdasarkan Peraturan yang ditetapkan CAVR. Ini adalah suatu proses yang formal, menetapkan dasar yang benar dan legitimasi proses masyarakat.

Langkah berikutnya adalah untuk mendengarkan, secara individu, dari tiap-tiap pemberi pernyataan. Setiap orang berdiri menghadap masyarakat, sisi pada Panel dan korban dan menjelaskan perannya pada bulan April 1999. sesudah berbicara, anggota Panel bertanya meminta penjelasan atau informasi yang lebih rinci seperti siapa yang merekrut mereka ke dalam milisi, atau siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan berbagai aksi. Anggota Panel cukup tegas dan menunjukkan kuasa mereka dengan penuh percaya diri, dan memperlakukan pemberi pernyataan dengan baik dan penuh respek. Semua sangat aktif, dengan Komisaris Regional memainkan peran sebagai fasilitator dan bukan mendominasi. Ini sangat baik, karena sebelumnya ada CRP yang ditangani oleh Komisaris Regional yang kurang pengalaman sehingga sering mendominasi anggota Panel lokal.

Karena ada 31 pemberi pernyataan, hal ini memakan waktu yang cukup lama – ada istirahat beberapa kali, Panel mengundang band lokal untuk memainkan beberapa lagu. Kelompok ini telah mengarang lagu khusus untuk rekonsiliasi dan ini menjadi lagu tema untuk hari itu. Setiap kali kelompok ini mulai, wanita-wanita tua pun mulai memukul gong mereka dan ini menjadi tanda bagi para penari untuk mulai menari dengan giring-giring pada pergelangan kaki mereka.

Semua deponen mendapatkan kesempatan untuk berbicara ketika kami beristirahat untuk makan siang. Dua kerbau telah dipotong khusus untuk acara ini.

## **Kesaksian Korban**

Sesudah makan siang, Panel mengundang korban untuk maju dan menceritakan pengalaman mereka. Ini dimulai dengan tiga anggota keluarga CNRT yang rumahnya dibakar dan harta milik mereka dihancurkan. Keluarga yang pertama diwakili oleh anggota keluarga laki-laki. Dia menceritakan ceritanya dengan penuh harga diri, dan membuat point yang cukup keras bahwa bagi dia dan keluarganya saat ini sangat penting untuk memberikan pengampunan untuk membantu membangun perdamaian dalam bangsa Timor Timur yang baru. Ketika dia telah selesai, anggota Panel perempuan menyarankan bahwa penting juga mendengarkan cerita istrinya, cara pandangnya dan partisipasinya dalam proses rekonsiliasi ini penting agar proses ini bisa berjalan dengan efektif. Ini adalah untuk menetapkan pola untuk hari itu, dan menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan yang efektif penting dalam Panel.

---

### **Hadirin menyuarakan persetujuan mereka, deponen, korban dan Panel semua bertepuk dan tertawa**

---

Keluarga korban yang kedua diminta untuk berbicara. Sekali lagi, kepala keluarga laki-laki yang berbicara. Dia berkata bahwa dia ingin memulai dengan sesuatu yang baik, dan mungkin dia akan menjadi sedikit maraj. Dia mengambil pengeras suara, memberi tanda kepada band dan mulai bernyanyi “Di sini senang (menunjuk kepada keluarga korban), di sana senang (menunjuk kepada deponen)...” dia berhenti, dan berkata dia ingin istrinya ikut serta, dan istrinya ikut bernyanyi dan mereka berdansa sambil bernyanyi bersama-sama. *be part of this, and she joined him and they danced arm-in-arm while singing this together.* Hadirin menyuarakan persetujuan mereka, deponen, korban dan Panel semua bertepuk dan tertawa – menghilangkan ketegangan dan sekali lagi dengan penuh harga diri dan peran kepemimpinan yang dimainkan oleh keluarga korban dalam proses ini.

Selama proses ini, korban-korban ditawarkan peran yang paling utama. Koordinator Divisi Dukungan Korban dari Kantor Nasional CAVR, Rosario Araujo, mengomentari sesudah hearing ini bahwa pada dasarnya ini adalah hearing untuk para korban, dan memainkan peran penting dalam membantu mengembalikan harga diri korban di depan masyarakat mereka.

Setelah semua korban telah berbicara waktunya tiba bagi anggota masyarakat. Mulai dengan lambat sejumlah anggota masyarakat mengambil kesempatan ini. Beberapa mengatakan bahwa beberapa deponen secara sengaja mengurangi keseriusan peran mereka dalam kejahatan. Misalnya, seorang mengatakan bahwa seorang deponen tidak hanya memukul korban sekali namun beberapa kali. Ketika informasi semacam ini muncul, deponen harus maju kembali dan menjawab semua tuduhan yang baru. Dalam kasus ini deponen mengakui bahwa dia memukul orang tersebut beberapa kali dalam jangka waktu tertentu pada tahun 1999.

Informasi baru yang sangat penting muncul ketika, setelah mendengarkan anggota masyarakat, seorang deponen menuduh bahwa salah satu dari deponen yang lain sebenarnya telah terlibat dalam membunuh dua orang. Regulasi CAVR dan mandatnya secara spesifik memberikan ruang untuk hal seperti ini. Panel mendengarkan informasi ini kemudian menginformasikan deponen dan masyarakat bahwa, mereka harus menunda hearing untuk deponen ini. Semua ini dilakukan secara terbuka di depan masyarakat, dan Panel dengan jelas, menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka mengambil tanggung jawab ini dengan sangat serius.

## **Menentukan tindakan rekonsiliasi yang sesuai**

Setelah semua pihak didengarkan, Panel melaksanakan tindakan yang sesuai untuk dilakukan olah deponen. Sehubungan dengan ketiga keluarga CNRT, ada diskusi panjang sebelum hearing dimulai. Disetujui bahwa penyerahan *tais*, koin perak, kantong tembakau, dan *tua sabu*

secara simbolik akan diserahkan kepada setiap keluarga. Ketiga keluarga dibawa ke depan, dan Panel menanyakan kepala keluarga perempuan untuk berbicara pertama-tama. Masing-masing berbicara dengan penuh harga diri bagaimana mereka menerima tawaran dalam semangat rekonsiliasi. Kemudian laki-laki berbicara. Sekali lagi korban, dengan perasaan dan cara pandang mereka sangat penting dalam menciptakan suasana rekonsiliasi.

Sesudah keluarga CNRT, korban yang kurang berpengaruh secara politik dipertimbangkan. Ini menimbulkan proses diskusi dan negosiasi yang sangat menarik. Contohnya, sejumlah korban – sebagian besar adalah petani miskin – menyatakan bahwa mereka tidak ingin diberi *tais* namun kompensasi keuangan. Ketika deponen berkata bahwa dia tidak memiliki uang, namun mempunyai manik-manik upacara, sang korban mengatakan bahwa dia telah membunuh kambingnya dan lebih memilih diberikan anak babi daripada manik-manik. Jadi kesepakatan dilakukan untuk tiap-tiap kasus. Seluruh proses memakan waktu satu jam, Panel membawa korban dan deponen untuk mendiskusikan masalah-masalah dan memastikan mereka mencapai suatu persetujuan yang dapat diterima semua pihak. Kelihatannya hal ini merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh para deponen. Ada elemen ketegangan dalam hal ini pada awalnya, tapi tampaknya bisa diselesaikan dengan sendirinya terutama karena keahlian dan ang baik yang dilakukan oleh Panel dalam menghadapi semua yang terlibat

Setelah ini selesai, tokoh adat sekali lagi menjadi pusat perhatian acara ini. Laki-laki dan perempuan tua maju dan membacakan nyanyian dalam bahasa upacara di hadapan korban dan deponen. Mereka dipercik dengan air berkat dari pucuk daun, kemudian sebuah barisan dibentuk kembali dari anggota Panel, Komisaris Nasional, anggota tim CAVR Oecussi dan korban, dan deponen saling berpelukan.

Hearing selesai pada jam 9 malam. Pada saat band melakukan pemanasan untuk dansa sepanjang malam, Komisaris Nasional Jacinto Alves dan Komisaris Distrik untuk Oecussi Mr Francisco Xavier Marques memberikan pidato. Acara ini direkam untuk produksi radio dan akan disiarkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Administrator Distrik dalam pidatonya, kesan saya yang sangat dalam adalah suatu peristiwa yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh CAVR. Dengan sangat dalam terbentuk di dalam budaya dan adat istiadat lokal, anggota masyarakat memastikan bahwa proses ini memiliki arti yang sebenarnya bagi kehidupan mereka – bahwa penting bagi mereka untuk menyatakan di depan umum apa yang terjadi dalam masyarakat mereka dan untuk menghadapi perpecahan di antara mereka. Dalam hal ini, baik deponen maupun korban secara berulang-ulang menekankan bahwa ini adalah bagian dari pembentukan budaya yang baru dalam perdamaian di desa mereka dan dengan cara ini menyumbang kepada pembangunan bangsa yang baru.

- *Program CAVR mengharuskan bahwa suatu tim bekerja dalam sub distrik selama tiga bulan dan menyelesaikan operasi utama dalam waktu itu sebelum pindah ke sub distrik berikutnya yaitu salah satu dari 13 sub distrik di Timor Timur. Mengenai CRP, selama bulan pertama tim mengidentifikasi masyarakat di mana CRP dapat dilakukan, menghubungi anggota masyarakat yang menyakiti masyarakat dalam konteks konflik politik masa lampau, menjelaskan proses ini kepada mereka dan menanyakan apabila mereka bersedia untuk ikut serta. Apabila CRP akan dijalankan, tim CAVR mengambil pernyataan dari deponen. Selama bulan kedua, pernyataan-pernyataan diserahkan ke Kantor Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dan mendapat persetujuan untuk CRP, sementara tim distrik bekerja dengan masyarakat untuk mempersiapkan hearing. Hearing diadakan di dalam masyarakat pada bulan ketiga. Seluruh proses membutuhkan kerja yang intensif dengan masyarakat, deponen dan korban, dan dengan anggota masyarakat yang akan menjadi anggota Panel yang memimpin hearing.*

# UPDATE / October –November 2002

## CONTENTS

12. Victims national hearing
13. Community reconciliation procedures
14. Truth-seeking program
15. Acolhimento/reception and victim support
16. Community outreach, public information and media
17. Community response to CAVR
18. Human resources
19. Capacity building and training
20. Advisory Council
21. Visits and visitors
22. Rehabilitation of former Balide prison

### Appendix:

Report on a Community Reconciliation Process, Oecussi, 22 November 2002.

The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR – the Portuguese acronym) is a national, independent, statutory authority. The Commission is mandated to undertake truth-seeking, facilitate community reconciliation, report on its work and findings and make recommendations for further action. For further information, visit the CAVR website at [www.easttimor-reconciliation.org](http://www.easttimor-reconciliation.org)

**Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao (CAVR)**

PO Box 144, Dili, East Timor

Mobile: 0407 394 957, Tel +670 (390) 313310 ext 4513

Email: [info@easttimor-reconciliation.org](mailto:info@easttimor-reconciliation.org)

Website: [www.easttimor-reconciliation.org](http://www.easttimor-reconciliation.org)

# UPDATE / October-November 2002

**The suffering of East Timor has been deep  
From this suffering comes Great Compassion  
Great Compassion makes a Peaceful Heart  
A Peaceful Heart makes a Peaceful Person  
A Peaceful Person makes a Peaceful Family  
A Peaceful Family makes a Peaceful Community  
A Peaceful Community makes a Peaceful Nation  
And a Peaceful Nation makes a Peaceful World.  
May all beings live in Happiness and Peace.**

*Adapted from Cambodia*

The last Update reported on Commission activities in August-September and focused on the final stages of the Commission's operational establishment, including the training and deployment of district teams. October-November has been a period of consolidating the program activities of these teams across the country. In this period, the Commission has become fully operational and taken major steps in the implementation of its core program, particularly in the key areas of victim-support, truth-seeking and community reconciliation. As a result, we are now able to report in some detail how the CAVR program is working out in practice on the ground. After the hard work involved in setting up, this is an exciting time for the Commission. To give readers a good insight into these activities – which are recounted here for the first time – the report includes several detailed accounts.

*Note: the acronym CAVR used in the report comprises the Portuguese initials for the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor.*

## 1. Victims national hearing

A major highlight of the past two months was the National Victim's Hearing 'Rona Ami Lian' (Tetun - 'Hear Our Voices') organised by CAVR, which took place on the 11 and 12 November 2002 in Dili. The hearing coincided with the 11th anniversary of the Santa Cruz massacre, in order to highlight the significance of this day for human rights in East Timor.

The event was a platform for the testimonies of fourteen East Timorese who each recounted their personal experiences of human rights violations in East Timor over the period of the political conflict. The aim was to recognise their stories and through these individual accounts to impart a sense of the national experience, in order to contribute to the healing of the individuals involved and the listening nation. The hearings were held in a public forum, the ex-CNRT auditorium adjacent to the Commission's national office, and were broadcast live nationally by Radio Timor Leste and Radio Rakambia. There was also national television coverage by TV Timor Leste and international coverage by CNN, Sydney Morning Herald, The Age, ABC Radio (Australia), AP, and the Norwegian press.

Much preparation went into the event, including a selection process in all districts from people who had already given statements to the CAVR during the first three months of its operations. Those selected to testify included people who had suffered human rights violations during the period CAVR is mandated to investigate, 1974-1999, a range of violations and a balance of women and men. Six women and eight men participated, ranging in age from the early twenties to the late sixties. A two-day workshop was held in Dili prior to the hearing to ensure that those testifying were well prepared and understood the process.

The hearings began after a ceremonial opening which included choral recitals, poetry and speeches by Jacob Fernandes, the Deputy-Speaker of the National Parliament and Aniceto Guterres Lopes, the Chairperson of CAVR. President Xanana Gusmao was out of the country at the time. Mr Fernandes said that as a Fretilin member of Parliament he strongly supported the Commission and listening to those who had suffered. In his comments, the CAVR Chair observed that 'through recognising the suffering of individuals, we are recognising the suffering of all Timorese, we are listening to our national story'. He added that 'it is important that we hear from victims from all periods of our mandate, including victims from all sides of the conflict. The CAVR is independent and has a responsibility to maintain this impartiality in all its work'.

Each person stood centre-stage between the National Commissioners and the others there to testify and, after a brief swearing-in ceremony, gave a oral account of their experiences. At the end of each testimony the National Commissioners asked questions to clarify any missing information and to encourage further reflection on the consequences of the experiences on that person's life. The dignity and composure with which the people taking part told their often disturbing stories was remarkable and profoundly affected all those listening to the hearings, whether they were present in the auditorium or were listening in their homes.

Asked by National Commissioners what they wanted to say to East Timor's leaders, the victims said the most important thing was to ensure their experience was never repeated in East Timor.

### Hearing their voices

*You have told us of your suffering during these two days of hearings, but I want to tell you that you are not alone. Through your stories you have shared your pain with us, and now we all feel this with you. You can see here today how the stories of your suffering have affected us all. We open our hearts to you.*

Aniceto Guterres Lopes, CAVR Chairperson

Madalena Pereira told how she had been held captive at an Indonesian military base in Ermera for a year, where she was kept as a 'war-bride' by a soldier there from 1977-78. She spoke of how she bore two children, one who died and a son who is alive. She also spoke of how she and her son continue to suffer stigma in her community to this day.

A particularly dramatic testimony was given by Atanacio da Costa, who spoke of a terrible militia assault outside his house in Oecussi April 1999. Cut repeatedly with machetes, he collapsed to the ground, where he was stabbed in the rectum with the barrel of a rifle. Mr da Costa re-enacted elements of this assault, to show how he was assaulted when he was totally helpless, and removed his shirt to show the scars of this attack. He told Commissioners of medical efforts to repair the damage, including ten operations, and the ongoing debilitating effects this has on his daily life.

In other testimony, Commissioners heard stories of forced imprisonment on Atauro of family members of the FALINTIL fighters, in the late 1970s. Teresinha da Silva of Aileu spoke of forced encampments by FRETILIN of the civilian population in 1975, before the Indonesian invasion, and the subsequent death by starvation of many people due to lack of food in these encampments.

In a deeply moving moment, and the final testimony of the two days, Esmeralda dos Santos gave testimony of how in September 1999 she was taken from the Suai church to a nearby school with other women, where they were kept for one week and repeatedly raped in front of others. She told how they were then taken to West Timor, where the sexual violations continued. She spoke of how she had borne a child from this experience, and asked the audience if she could present her daughter to them. All acclaimed that they welcomed her one-year old daughter, and she was brought onto the stage. Esmeralda introduced Mary Robinson, named after the then High Commissioner for Human Rights who had visited her in Suai in 2000 and met her new born baby. Esmeralda, as with the other women before her, spoke with strength and clarity about her experience, and presented herself with great dignity. Nearing the end of Esmeralda's testimony, emotions were close to the surface. Around the auditorium groups of people were crying and leaning upon each other. They said that listening to these stories had brought back their own traumatic experiences: one young woman, surrounded by a group of crying friends, recalled the murder of her husband one day after her marriage, in August 1999.

A week after this audience, CAVR teams visiting a hill-village in the enclave of Oecussi, one of the most remote parts of East Timor, told how they listened to the live radio coverage of the hearings, and wept at the testimony of Esmeralda.

*The full text of the testimonies will be published on the CAVR website: [www.easttimor-reconciliation.org](http://www.easttimor-reconciliation.org)*

## 2. Community reconciliation procedures

The Commission is actively involved in facilitating community reconciliation across East Timor and is rapidly growing in confidence in the concept and conduct of this sensitive process. Successful reconciliation hearings have now been conducted in the five districts in which CAVR commenced its field work. The program was previously delayed due to uncertainty following the introduction in May of a proposed amnesty law. However, encouraged by support from various quarters including from Lu'Olo, the President of both the National Parliament and the majority Fretilin Party, the Commission decided to move forward and held its first hearing in Maumeta, Liquica, on 23 August witnessed by Mary Robinson, then High Commissioner for Human Rights.

Since then, 143 perpetrators have voluntarily provided statements to CAVR. To date reconciliation hearings have been held involving 50 of these perpetrators. These processes are aimed at assisting the reintegration of people who have harmed their communities by relatively minor offences, and are based on a perpetrator coming forward voluntarily to participate. Most perpetrators have been low-level members of militia-type groups operating in 1999. As most of the hearings have been held at village level, they are very much a grassroots reconciliation process involving people who have been divided by violence but who otherwise live so closely they are almost family. Hearings have ranged from simple events involving one perpetrator to richly cultural community ceremonies involving large numbers of deponents, but all have so far been characterised by a strong community impulse of forgiveness. Victims who attend the hearings have the opportunity to question deponents and to speak about how the violence has affected their lives, including leading to impoverishment. Many have stressed the importance of trying to put the violence behind them and to move on with building the new nation. All hearings have involved local traditional *lulik* or *adat* ceremonial rites, with the *lia nain* playing an important ceremonial role. *Lulik* (Tetun) or *adat* (Indonesian) is the system of traditional law and custom regulating village life. The keeper of this system is the *lia nain* whose participation enhances the credibility of the hearings in local communities. Evidence from the first 3 months of operations is that perpetrators, victims and communities consider the process very relevant and the Commission expects that the demand for the official process offered by CAVR will increase significantly. December will see hearings being held in Ermera, Maliana, Manufahi and other districts.

Procedures have been put in place with the Office of the General Prosecutor which is required to give approval for hearings to go ahead in each case. These have been working very effectively.

Following is a summary account of recent reconciliation hearings:

**29 October: Fafelebo, near Liquica.** One deponent and one victim. Deponent involved in intimidation and beating. Hearing resulted in agreement that deponent should repair a local school, working together with the victim after the victim volunteered to assist.

**30 October: Lacluta, near Viqueque.** Nine deponents, nine victim's families. Deponents involved in house burnings and destruction of property. Hearing resulted in agreement that all deponents will work one day a week for 4 weeks building a church.

**13 November: Tutuala, Los Palos district.** One deponent, two victims. Deponent involved in intimidation and beating. No community reconciliation act was considered necessary.

**18 November: Haleu, Metinaro, near Dili.** The Hearing was attended by some 500 people and opened by the village chief who explained to the audience that by taking part in the process of reconciliation they were helping to build a new nation. The deponent explained that while he had joined a Timorese militia group in 1999, he had been forced to do so under threat

by the Indonesian military and felt he had no other choice. He stressed he had not committed any crimes and apologised to all present for his actions. After consulting with the community present and discussing amongst themselves, the 5-member panel (comprising Regional Commissioner Juanico P. dos Santos, the village chief, the traditional village leader, and representatives of the church and youth) announced that the deponent's apology was adequate punishment and no other penalty would be given.

**19 November: Babuli, Metinaro, near Dili:** three deponents, five victims. The hearing was led by Dili Regional Commissioner Teresina M. Cordoso. The first two deponents had between them burned down 5 homes in the community in 1999; the third was a former militia member who had threatened community members to vote for autonomy with Indonesia in 1999. All three men apologised for their actions, asked for forgiveness, promised never to repeat such actions and said they had committed their crimes under threat by the Indonesian military. Following questions by the community to the deponents, the panel decided not to impose any penalty on the first deponent. A decision regarding the other two deponents was suspended because victims of their offences were not present. The deponents embraced the victims and members of the audience then ate betel nut and drank palm wine together as a sign of reconciliation.

**22 November: Nitibe, Oecussi.** 31 deponents and numerous victims. Deponents responsible for destruction of property, destruction and theft of livestock, physical assault and intimidation. Some deponents made a symbolic gift of tais (woven Timorese fabric) and traditional ornaments to the families of the victims. Others arranged the payment of livestock. *(See Appendix for a detailed account of the Nitibe reconciliation)*

### 3. Truth-seeking program

The Truth-Seeking Division is the largest section in CAVR with a nation-wide staff of more than 70 personnel. The Division comprises Statement-Takers (56 field workers), Statement Readers (6 based at the national office, assisted by one international), Date Processors (4 based at the national office), a Research/Investigation Team (3 in the national office, assisted by three internationals), and a Public Hearing Officer (currently vacant). The Division is headed by Hugo Fernandes.

By the end of November, CAVR district teams working in all 13 districts have taken 2160 statements. These statements relate to violations which occurred in the CAVR's mandate period 1974-1999. The statement taking teams have developed their skills considerably on the job and can be expected to increase the number of statements and their quality as their work progresses. They have been supported in their work by national office staff who have monitored the quality of statements and provided further training as required. At the current rate of statement-taking, CAVR is on track to reach its planned target of 8700 statements.

During the period under review, consultant Ken Ward completed and set up the CAVR data base, assisted in the recruitment of four data entry personnel and provided them with training. Following perusal and codification of the statements by a team of six statement readers, the data is entered on the new data base. The four processors are currently entering 20 statements a day, a rate which is confidently expected to increase with practice. The team is currently assisted by an international adviser, Sophie Kahn, who also providing analysis of the statements. Technical backup is being provided by the CAVR IT unit.

Working with National Commissioners and senior East Timorese staff, historian and Indonesia-expert Dr Gerry van Klinken has finalised the CAVR research program and completed his 3-month consultancy. As reported in the previous Update, the program will research a number of significant national issues including displacement and famine, significant massacres, the Indonesian military, and the impact of violations on women and children. East Timorese staff

have been recruited into research positions, and with the assistance of a GTZ (German) capacity building grant, two international staff have joined CAVR for a short period to assist this team. The team has commenced field research in two areas – massacres and displacement/famine. CAVR Special Advisor Pat Walsh will coordinate the program in cooperation with Hugo Fernandes, Head of the Truth-Seeking Division, and Dr van Klinken who will return to East Timor in the new year. Research is also underway in preparation for a public hearing on political prisoners, scheduled for mid February.

#### **4. Acolhimento/reception and victim support**

An estimated 32,000 plus East Timorese continue to live as refugees in West Timor and CAVR is deeply concerned to assist in their social re-integration in East Timor should they chose to return home. To this end, CAVR has undertaken the following activities during the last two months:

- Commissioner Isabel Guterres has continued to actively monitor the situation in West Timor and has joined UNHCR in assisting with 'go and see' visits to the Viqueque area of East Timor.
- CAVR accepted an invitation from President Xanana Gusmao to accompany him on his visit to West Timor, 30 October – 4 November. The CAVR delegation comprised CAVR Chair, Aniceto Guterres Lopes, National Commissioners Olandina Caeiro and Rev Agostinho de Vasconcelos, and three staff – Hugo Fernandes (Truth-Seeking Division), Lamartinho Oliveira (Media Liaison) and Antonia Carmen (Radio Program Officer). The schedule included visits to Kupang, Kefa, Atambua and Mota Ain and provided CAVR with an excellent opportunity to explain the work of the Commission and counter common misconceptions about life in East Timor. President Gusmao was forthright in his support for the Commission and the rule of law/justice in East Timor. The visit was followed by a second meeting with pro-autonomy leaders held in Bali on 13 November, which Aniceto Guterres Lopes, CAVR Chair, attended at the President's invitation.
- CAVR has continued to dialogue with UNHCR about their mutual roles in the context of UNHCR's downsizing. This included a joint visit to the UNHCR border post at Batugade on 26 November.

As a result of the above activity, CAVR has decided on two important initiatives in relation to West Timor:

- To actively and concretely explore the possibilities of statement-taking in West Timor, so that - in line with CAVR's independence and impartiality - East Timorese there have the opportunity to participate in truth-telling. This will require the cooperation of the Governments of both Indonesia and East Timor, an intensive public information program and consideration of security and financial implications.
- To discuss with UNHCR the placement of a CAVR officer in the UNHCR Batugade reception centre. The officer's role will be to meet refugees as they return, to explain to them how CAVR might assist with their social re-integration, to inform the relevant CAVR regional offices about East Timorese returning to their areas and to cooperate with national and district UNMISSET Human Rights officers to ensure protection of returnee rights.

The National Office Victim Support and District Victim Support teams have been very busy during the past two months.

At the National Office, the team focussed on preparation for the first national victims' hearing on 11-12 November. This involved extensive liaison in all districts, conducting a 3-day preparation workshop for all participants prior to the hearing, support throughout the hearing and follow-up support.

In addition, the National team has commenced implementation of a field-based training for Regional Commissioners and District Victim Support staff in relation to mapping the impact of violence upon communities. These trainings take place in communities, in a learning-by-doing process. By the end of November, the trainings had been held in Liquica, Baucau, Lautem, Viqueque and Manufahe. The remaining districts will complete this training throughout December. District teams have also been busy supporting the community reconciliation process, which has a strong emphasis on supporting victims and assisting in restoring their dignity.

## **5. Community outreach, public information and media**

As CAVR has become fully operational in the districts, public information and media are increasingly important.

Radio has been identified as the optimum means of communication for East Timor. With support from a USAID grant, a Public Information Team has been formed with to focus on radio. The team has been gathering material from all districts and recording national events. A weekly radio program will commence on 4 December. The program will be broadcast on Radio Timor Leste, Radio Kmanek and community radio throughout the districts. A particular aim is to record events in the districts and the voices of community members across the country so that a truly national process of healing and reconciliation is projected.

A 25 minute community education video cassette disk has been completed in November, with the assistance of British funding. The video was screened on TVTL on 10 November, the eve of the first national public hearing, and was well received. It will be distributed to all district teams for use in socialisation activities in each sub-district, and to relevant NGOs and community organisations. Initially in Tetum, the video is being produced with an English language voice-over for donors and international agencies.

With activities taking place across East Timor, local media is increasing its coverage of the Commission. TVTL filmed the large community reconciliation event in Lacluta, Viqueque, on 30 October. Radio has covered a number of other reconciliation events. Timorese media played a key role in projecting the first national hearing to a national audience. Radio Timor Leste and Radio Rakambia broadcast live from the hearing. Reports of the emotional power of the testimony from community members in the Oecussi mountain village of Lele-Ufe testify to the power of this medium. Radio Timor Leste has conducted a series of four panel discussions with key Timorese civil society leaders about the work of the Commission over the past two months. The national daily, Suara Timor Lorosae, and several magazines have also covered CAVR activities and issues related to the Commission.

International media took a particular interest in the public hearing on 11-12 November. The hearing attracted stories by CNN, Sydney Morning Herald, The Age (Melbourne), ABC Radio (Australia), AP, and a Norwegian newspaper. In addition, international media have run stories on community reconciliation hearings.

In the new year, a second video cassette disc will be produced showing community reconciliation events across the country. Print materials are also planned for early new year, especially to assist local communities to understand fully their opportunity to participate in the processes of the Commission and to foster enthusiasm for healing, reconciliation and peacebuilding. A series of public events such as concerts, art, poetry and music competitions will encourage this spirit.

CAVR is exploring a plan with UNHCR to receive returnees from West Timor at the UNHCR Batugade reception post which will involve briefing returnees on CAVR and how it can assist

with social re-integration. This will involve distribution of literature especially prepared for these East Timorese.

Following meetings in September with NGOs and the media, the Community Outreach Division has continued its program of meetings with key stakeholders. On 21 October, a meeting was held with political parties. Representatives of 10 political parties attended. A separate meeting is planned with the Fretilin majority party.

## **6. Community response to CAVR**

During the October-November period, in response to CAVR's increased activity and visibility, Timorese media has been reporting community participation in CAVR-facilitated activities and the CAVR work generally.

Community response to the CAVR at district level has been positive and welcoming and people have shown an eager willingness to participate in the various elements of the CAVR work. CAVR must now consider how it can effectively meet this high community demand to participate.

Within this context, there has been some criticism of the CAVR in certain districts. This seems to be locally focussed, and relates to local issues such as particular Regional Commissioners or staff members and their background. For example, in Oecussi a letter was submitted to the CAVR in complaint about the appointment of one Regional Commissioner. In November, National Commissioners Jacinto Alves and Rev. Agostinho de Vasconcelos visited Oecussi. They met with local administration and traditional leaders, and the district UNMISSET Human Rights Officer, about a range of issues relating to the CAVR, including this issue. National Commissioners will return to Oecussi in December for further consultations including with signatories to the letter of complaint.

Timorese media has also reported some discontent with the background of CAVR staff in the Ainaro district. CAVR National Office staff and National Commissioners have travelled to Ainaro and met with community members. Though the issue does not appear to be serious, there is a need for ongoing public information and community education about the CAVR, its independent character and mandate. For example, some community members were angered because they said that only Fretilin members should be allowed to be staff of the CAVR; others said that anyone who did not support independence actively should not be allowed to be a staff member. National Commissioners and senior staff have participated in two nationally broadcast radio panel discussions about these issues, to offer clarification.

It should also be noted that a Regional Commissioner in Manufahe district has resigned for personal reasons, and the National Commissioners are in the process of starting community consultations to select a new Commissioner.

## **7. Human resources**

Ten Timorese staff joined the National Office during October-November. They include two finance officers, and a team of researchers and data processors. This latter group is responsible for entering key data from the 2160 statements so far gathered by CAVR. They have been trained by an international data-base expert, Ken Ward, who designed the CAVR data-base.

A number of short-term international team members have also joined the CAVR in October-November, with a focus on capacity building during this consolidation period. These include

support for statement analysis and data processing, research, community reconciliation, public hearings, victim support, technical radio and video production. Two new staff members have joined the CAVR: Amy Rothschild for one year (supported by Yale/Notre Dame Universities) and Chris Vertucci for two years (supported by the Mennonite Central Committee).

CAVR is pleased to confirm that all ten positions allocated in the UNDP '200 list' have received donor support. While funds are pledged, most positions have not yet been filled. Through British/EC funding, the Program Manager position has been filled in November and Ms Galuh Wandita has commenced work. The Legal Counsel position (made possible through British/EC funding) has also been filled, and the successful applicant is expected to take up the position in January 2003. Funding for other positions is pledged, but positions not yet recruited. AusAID has confirmed it will provide a Finance Advisor to CAVR for six months. Other Advisor positions will be supported by the EC, Denmark and Japan.

## **8. Capacity building and training**

In October, the German development agency GTZ provided CAVR with a special grant of USD17,500 for capacity building for activities till the end of December. This has allowed timely capacity building inputs, including the following:

- Development of a program of effective recognition and support to victims of human rights violations suffering from trauma, and self-care for CAVR Commissioners and staff (Input: from a psychologist with extensive East Timor experience).
- Training of trainers for the national office Victim Support team, and in-field training for district Victim Support officers and Regional Commissioners for community mapping exercises to measure the impact of violence upon communities; recognising trauma-related behaviour in victims of human rights violations and developing effective referral networks and processes; and self-care for Victim Support Officers and Truth Seeking Statement Takers. Focus on district training by running programmes with communities. (Input: two months of technical assistance by a psychologist with extensive community development experience in East Timor).
- A support training video for district teams about recognition of trauma and strategies for dealing with it, and self-care in terms of vicarious trauma. This is currently in production and will be supplied to all district team members. (Input: video producer)
- Capacity building of Truth-Seeking statement analysis team, and through this quality improvement of district team statement takers work. Also capacity building of data-entry team in use of data-base, and ensuring effective coordination mechanisms between data-entry team, statement analysers and district statement takers. (Input: one international for 6 weeks).
- Information production training: this included radio Cooledit training for the CAVR Information Production team (on-the-job during production schedules for weekly radio program); video shooting and editing training for CAVR Information Production team. (Input: one international trainer for one month)

In addition, the Institutional Development and Training Team, working with the Regional Co-ordination Team, has developed a regular support and monitoring process for district teams, in order to develop a responsive process to meet ongoing needs.

## **9. Advisory Council**

National Commissioners are establishing an Advisory Council of prominent individuals, both East Timorese and internationals. The Council will enhance the Commission's status and credibility and assist the Commission by providing authoritative advice and feedback. The

composition of the Council, some 10 individuals, will be announced in the New Year after invitees have confirmed their acceptance.

## 10. Finances and procurement

The Commission has undertaken significant expenditure in the last few months to establish, equip and operate its large national staff and program. Following are the main developments during the October-November period:

- The CAVR Chairperson, Aniceto Guterres Lopes, and the German Government agency GTZ signed a grant contract for Euro200,000 on 21 November.
- Germany has also provided USD17,500 to assist with capacity-building in the Public Information/Community Outreach program of the Commission.
- The British Embassy is in the process of transferring USD61,000 to the CAVR account, being the balance a previous grant.
- USAID has provided USD7,985.00 to enable the in-house production of weekly radio programs for broadcast on national and community radio throughout East Timor.
- UNHCR is providing CAVR with some equipment, including several vehicles, as it downsizes its program in East Timor.
- AusAID has formally agreed to provide a Finance Advisor to CAVR for a six-month period. The appointment is being managed by ITC's Australia-East Timor Capacity Building Facility (CBF) in collaboration with UNDP and will be made in the New Year.
- CAVR has written to Prime Minister Alkatiri requesting that the Inspector-General conduct another financial audit of CAVR in December.

## 11. Visits and visitors

- 4 October: briefing of donors and presentation of August-September Update.
- 14 October: presentation to human rights training program provided by the International Service for Human Rights, a Geneva-based NGO.
- 15 October: briefing to international prison assessment mission.
- 17 October: briefing of East Timorese political parties
- 29 October: briefing of Misereor representatives, Dr Martin Brockelmann-Simon, Managing Director, and Dr Duetting (Asia Director)
- October: Commissioner Isabel Guterres joined UNHCR on several refugee 'go and see' visits to the Viqueque area;
- 30 October-4 November: six National Commissioners and staff visit East Timorese refugees in West Timor with President Xanana Gusmao.
- 8 November: meeting with representatives of Japanese Government, Hashi Hiroharu, Akiko Hayashida (Ministry of Foreign Affairs, Tokyo) and Shinichi Kusano (First Secretary, Embassy of Japan, Indonesia)
- 13 November: CAVR Chair visit to Bali with President Xanana Gusmao.
- 18 November: briefing to international justice assessment mission
- 25 November: CAVR Chair meeting with Prime Minister Alkatiri.
- 26 November: visit with UNHCR to Batugade reception centre for returnees.
- 26 November: briefing of international police assessment mission.
- 28 November: meeting with John Pitt, Managing Director, Pitt and Sherry.
- 29 November: CAVR Chair, Aniceto Guterres Lopes, and Advisor Kieran Dwyer, depart for international meeting of truth commissions in New York.

## **12. Rehabilitation of former Balide prison**

Work is proceeding on the rehabilitation of the former colonial prison in Balide, Dili, which will serve as the CAVR national office. This is a human rights heritage project which will be transferred to community management after CAVR completes its mandate in 2004. A new roof, concrete flooring in several areas, extensive rendering, and electrical re-wiring and re-plumbing are nearing completion. Layers of paint (applied over the years to clean up the prison ahead of visits by various international delegations) have been stripped off the internal walls revealing prisoner graffiti written over 25 years ago, some of which will be preserved. The construction of a large traditional meeting house is underway in the main courtyard (former exercise yard). The project is behind schedule. It is planned to hold the first thematic public hearing (on political prisoners) in the new premises in mid February.

To help develop thinking about the long-term use of the complex, CAVR is in contact with several human rights-related heritage projects in other countries. These include Ireland (the Strokestown Park Famine Museum in County Roscommon), Japan (Hiroshima Peace Memorial Museum) and Australia (Port Arthur Convict Prison, Tasmania).

The rehabilitation is being funded by Japan. A CAVR delegation will visit Japan in February as guests of the Japanese Government.

---

## APPENDIX

### ***Report on a Community Reconciliation Process Suco Lela-Ufe, Nitibe, Oecussi on 22 November 2002***

By Kieran Dwyer, Advisor to CAVR

*This process today is very important to us. It is important to me as a victim, because it shows that I can stand up in my community and say what really happened. But for me, it is even more important because it helps us move forward, as a community and a new nation. We had so many years of fear and suffering. And so many years of being divided. Now we can begin to walk forward together, and build a new nation for us all and for our children.*

Victim of human rights violation at Lele-Ufe community reconciliation hearing

*In Oecussi we have been hindered in our efforts at economic development by divisions in our community from 1999. If we cannot all work together as East Timorese, we cannot build our new nation and especially our district of Oecussi. Today, with the help of the Commisison for Reception, Truth and Reconciliation, we are able to heal the divisions in our community, and this helps us come together to look forward to developing our whole community together.*

Francisco Xavier Marques, District Administrator, Oecussi

*This process today is not the end of the reconciliation process in your community. It is a beginning of a new social process. In this process we all have to look at our history. Reconciliation does not mean that we forget about our past, but it means that we look at it in order to understand ourselves better and to be able to move forward as a community. This is a process we can call developing a new social conscience. Through this process, we can go on to create a culture of peace in our new East Timor.*

Jacinto Alves, CAVR National Commissioner

This was the first Community Reconciliation Process (CRP) in the district of Oecussi, and came after the district team had been working in Nitibe (a sub-district of Oecussi) for nearly three months\*. This brief report aims to share some of my observations of the process, especially as I was particularly impressed with the community leadership and ownership of this process and the deep sense of satisfaction so many community members expressed with it.

The hearing was held in the village of Lela-Ufe, a mountain village (*suco*) about one and a half hours drive in the dry season from Oecussi town (31 km). The village sits on a ridge, overlooking the hills of Indonesian West Timor on one side, and valleys of Oecussi district on the other. The *suco* is comprised of four *aldeais* or sub-villages, several of which require a long walk.

Visiting Lela-Ufe the day before the hearing, I met with a number of the village elders who would make up the panel for the hearing, who were meeting with Mr Arnold Sunny, the Regional Commissioner in the Oecussi team, the chairperson of the panel. He was meeting to brief the elders, and also to discuss generally with them their thoughts about how the day should proceed. With them were some of the key *lia-nain*, or *tokoh-adat* of the village, keepers of the traditional customs and law. Nitibe is known as a place of very strong continuance of traditional customs, and I immediately noticed the elaborate silver (or like metal) tobacco holders and woven baskets used by the men. We sat outside overlooking West Timor, beside a traditional round, cone-roofed *uma lulik* (sacred house), and below a wooden *lulik* (sacred) monument.

I was told how in 1999 the village had been physically divided upon political lines. Pro-independence families lived on one side of the village, militia groups lived on the other. This division was a very strong symbol of the deeper divisions in the community. Elders said that

one aim of the reconciliation ceremony was to involve the whole community in healing this divide. In order to symbolise this, they had made some very specific arrangements about how people would be seated and how the process would proceed for the hearing. They explained that the hearing would place much emphasis on the dignity of the victims, though not at the expense of the perpetrators (or 'deponents' as they are known in the process). In fact, the perpetrators were provided with a special shade cloth (UNHCR issue!), to show that the hearing was placing special emphasis on returning them to the centre of the community.

### **31 deponents**

The hearing was to involve 31 members of what had been the local *Sakunar* (Scorpien) militia of 1999, and focussed on their activities during April 1999. These had included the burning of houses and destroying of property of local prominent CNRT members, as well as physical assaults, intimidation and stealing of livestock of other community members. The 31 were relatively low-level members of the group, not leaders. They had returned to Oecussi in April 2002.

Each member had already made a written statement, assisted by CAVR district staff, detailing what they had done, who they had done it with and why. These statements had been sent to Office of the General Prosecutor, who had approved the cases for CRPs. Approval of the last 11 cases had only been received days before the hearing, and the panel was not sure if all of these would go ahead – staff were seeking victims and their families that afternoon, to see if they wished to be part of the hearing (they had previously been contacted, but were unaware that these cases had now returned from the Prosecutor General's office).

The hearing was scheduled for a 10 o'clock start the next morning.

Arriving for the hearing at about 9am, we came upon a festive atmosphere. The hearing was to take place in the grounds behind the village church. Already hundreds of people had gathered. A band – electric guitar, keyboard and violin (CAVR generator-backed) – was keeping the crowd entertained on one side, while a group of elder women prepared their metal gongs under a tree. Next to the women, a group of people were dressing in fantastic traditional costume of white metal, silver-like bodices and tiered head-dress, bells attached to ankles. One moment the focus seemed to be on the band, the next on the elder women and those dressed for traditional dancing. Then they would all strike up together.

A large number of people were wearing what was clearly their ceremonial best *tais* (woven sarong), often with the orange stone beads – these, I learned, were either deponents, victims or staff of the CAVR. With 31 deponents, this led to a large number of highly dressed up people, and the feeling of a very special occasion.

The area behind the village church was a dusty hillside, built up in grades with drystone walls making four platforms leading to a peak for the *lulik* or *adat* platform. A wooden branch was planted in the ground at the centre. At its base were a variety of wooden containers. Beads and bunches of leaves hung from the wood, as did two buffalo heads with accompanying gore. Also two full buffalo bladders. At this peak, a slim, spritely old man sat on haunches together with an old woman dressed in sarong and black blouse with the local orange stone beads that many wore for the day. Both were clearly significant traditional law makers. The area was shaded by a large tree. Behind the church, beneath the central *lulik* place, the hearing was taking place at the core of the village.

As time approached, I noticed several of the people in the white metal bodices mobilising people, and in particular one elder moving about with particular energy. They were members of the panel, and were gathering up the deponents and the victims to take their places on either side of the panel, just below the *lulik* place. A calling of names over the PA system brought more people to their places, and we were ready to begin. Commission staff welcomed

everyone to the event, and then called upon the panel to enter: a procession of panel members with the dancers in traditional wear entered with full ceremonial pomp, emphasised by their elaborate silverware costume.

Taking their places upon the *biti bo'ot* (big mat), the panel members set about explaining to community members how things would proceed. The *biti bo'ot* was just below the *lulik* shrine, with deponents sitting to their right, and victims to their left. Community members sat to the front, spread to left and right. Local dignitaries, including the District Administrator, the District Police Chief, Village Chiefs from the sub-district and local leaders of all political parties sat under a tarpaulin at the front. The UNMISSET Oecussi Human Rights Officer estimated that there were 1000 community members present.

### **Opening**

The process was ceremonially opened with the *tokoh adat* spreading a colourful *tais* upon the *biti bo'ot*, in front of the Panel and between the deponents and victims. I was told this symbolised a bridging between perpetrators and victims. Regional Commissioner Jose Antonio Ote opened the hearing with a prayer. He played no role with the Panel as he was in fact a victim at the hearing, his house having been burnt during this violence in April 1999. The entire process was conducted in the local language *Baikeno*, as most village people speak neither Tetum nor Bahasa Indonesia.

Proceedings began with the Chair of the Panel, Mr Arnold Sunny, reading a summary of the statements of the deponents and affirming that the Prosecutor General had approved the case for a CRP. He explained the legal basis for the CRP hearing pursuant to the Regulation establishing the CAVR. This was quite a formal process, setting a proper foundation and legitimacy for the community process.

The next step was to hear, individually, from each deponent. Each stood facing the community, side-on to the Panel and victims and explained his role in the April 1999 violence in the village. After speaking, Panel members asked questions seeking clarification or more detailed information such as who had recruited them into the militia groups, and who had ordered various actions. Panel members were firm and indicated their authority with dignity, and treated deponents with courtesy and respect. All were very active, with the Regional Commissioner playing a facilitating rather than a dominating role. This was especially good to see, as some earlier CRPs had seen inexperienced Regional Commissioners tending to dominate local Panel members.

With 31 deponents, this took some time – there were several short breaks, when the Panel invited the local band to play some music. The group had composed a special reconciliation song for the event, and this became the theme song for the day. Each time the group struck up, the elder women also began beating their gongs on the other side of the gathering, and this was the signal for the elaborately dressed dancers to stand and dance with their ankle bells and silver-metal costumes all ajangle.

After the deponents had all had their say we broke for lunch. Two buffaloes had been ceremonially killed for the event.

### **Testimony by victims**

After lunch, the Panel invited victims to come forward and tell their story. This began with three prominent CNRT families whose houses had been burnt and property destroyed. The first family was represented by the male head of household. He told his story with quiet dignity, and made a strong point that for him and his family it was now important for them to forgive in order to contribute to building peace in the new nation of East Timor. When he had finished, the woman Panel member suggested it was also important to hear from his wife, that her

perspective and her active participation in this reconciliation was necessary if the process was to be effective. This was to set a pattern for the day, and showed how important effective women's leadership on the Panel is.

---

***The crowd cheered its approval, deponents, victims  
and the Panel all clapped and laughed***

---

The second victim family was asked to speak. Again, the male head of household began. He said that he wanted to start with something good, and then perhaps he would get a little angry. He took up the microphone, signalled to the band and began singing a well-known Indonesian tune with words to the effect of "We're happy here (pointing to the victim families), we're happy there (pointing to the deponents) ...". He stopped, said he needed his wife to be part of this, and she joined him and they danced arm-in-arm while singing this together. The crowd cheered its approval, deponents, victims and the Panel all clapped and laughed - a lifting of tension and another sign of the dignity and leadership role that victims and their families play in this process.

Throughout the process, victims were offered a very central role. The Co-ordinator of the Victim Support Division of the CAVR National Office, Rosario Araujo, commented to me after the hearing that in fact this was effectively also a victims' hearing, and played a key role in assisting to restore the dignity of victims before their community.

Once all the victims had spoken, it was time to open the floor to community members. Slow to start, a number of community members took this opportunity. Some suggested that some deponents had deliberately understated their role in violence. For example, it was suggested that one deponent had not just beaten a victim once, but on a number of occasions. When this sort of information was produced, a deponent was required to come forward again, and answer any new allegations. On this occasion, the deponent admitted that he had in fact beaten this man repeatedly over a period of time in 1999.

The most significant new information emerged when, after hearing from community members, a deponent alleged that one of the other deponents had in fact been involved in the killing of two people. The Regulation establishing the CAVR and its mandate specifically allows for such situations. The Panel heard this information, deliberated, and informed the deponent and the community that, in light of this, they were required to suspend the hearing for this deponent. All of this was done openly before the community, and the Panel clearly took, and showed the community it took, its responsibilities very seriously.

### ***Determining an appropriate act of reconciliation***

Once everyone had been heard from, the Panel deliberated upon the appropriate acts of reconciliation to be carried out by each deponent. In relation to the three CNRT families, there had been extensive discussions prior to the hearing. It was agreed that a symbolic offering of *tais*, silver-metal coins, tobacco pouch and *tua sabu* (locally brewed distilled liquor) would be made to each family. The three families were brought forward, and the Panel asked the woman head of household to speak first. Each spoke with dignity of how they accepted the offering in a spirit of reconciliation. Then the men spoke. Again the victims, and their feelings and perspectives, were central to creating a real sense of reconciliation.

After the CNRT families, less overtly political victims' matters were considered. This produced a very interesting process of discussion and negotiation. For example, a number of victims – mostly poor farmers – made the point that they did not want *tais*, but financial compensation. When a deponent said that he had no money, but did have ceremonial beads, the victim pointed out that he had killed his goat and that he would rather have a baby pig than the beads. So, agreements were struck for each case. This whole process took over an hour, as the Panel

brought victims and deponents forward to discuss matters to ensure they reached agreements that were acceptable to all. It seemed to me that this came as a bit of a surprise to some deponents. There was an element of tension about this at first, but seemed to work itself out especially due to the very skilled and courteous way the Panel dealt with all concerned.

This completed, the *tokoh adat* was again at the centre of the event. The elder man and woman came forward and chanted in ceremonial language before the deponents and victims. They were sprayed with blessed water from a sprig of leaves, and then a line was formed made up of Panel members, National Commissioners, Oecussi CAVR team members and victims, and the deponents moving along the line with embraces for everyone.

The hearing ended at 9pm. As the band warmed up for the all-night dance, speeches were given by National Commissioner Jacinto Alves and the Oecussi District Commissioner Mr Francisco Xavier Marques. The event was filmed, and recorded for radio production, and excerpts will be broadcast.

As the speech of the District Administrator indicated, my overwhelming impression had been of a community-driven event facilitated by the CAVR. Deeply embedded in the strong local culture and custom, community members affirmed that this process had real meaning for their lives – that it was important for them to publicly acknowledge what had happened in their community and to deal with the rift that had divided them. In this, both deponents and victims repeatedly made the point that this was part of building a new culture of peace in their village and in this way contributing to building their new nation.

*\* CAVR's program requires that a team works in a sub-district for three months and completes its core operation in that time before moving to the next sub-district in one of East Timor's 13 districts. In terms of the CRPs (Community Reconciliation Procedures), during the first month the team identifies communities where the CRP is relevant, contacts community members who have harmed that community in the context of the past political conflict, explains the process to them and asks if they would like to participate. If a CRP is then to go ahead, the CAVR team takes a statement from the deponent. During the second month, statements are sent to the Office of the Prosecutor General for consideration and approval for the CRP, while the district team works with the community to prepare for hearings. Hearings take place in the community in the third month. The whole process involves intensive work with communities, deponents and victims, and with community members who will become members of the panel presiding over the hearing.*